



Laporan Kinerja

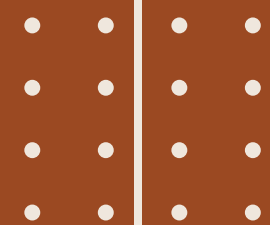


SAT BRIMOBDA DIY



2023

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH JAWA, BALI,
NUSA TENGGARA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Ancaman dan gangguan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan berupa perambahan, penebangan liar, perburuan liar, pengambilan liar fauna dan atau flora, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan, kerusakan habitat fauna dan atau flora dilindungi serta kegiatan-kegiatan liar lainnya seperti pencemaran lingkungan, limbah B3 yang mengancam keberfungsian ekosistem beserta dinamika ekologisnya semakin lama semakin tinggi dan masiv. Guna menahan laju tekanan terhadap daya dukung lingkungan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan upaya-upaya preemtif, preventif, represif dan yustisi yang mendukung rencana strategis penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024. Sasaran strategis 2020-2024 mengakselerasi capaian sasaran strategis Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara melalui 5 kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan.
2. Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
3. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana.
4. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
5. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

BPPHLHK Wilayah Jabalnusra pada tahun 2023 mendapatkan target pencapaian pada 10 Indikator kinerja kegiatan, yaitu :

1. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan sebanyak 6 Operasi.
2. Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal sebanyak 6 Operasi.
3. Peningkatan Kapasitas Polisis Kehutanan sebanyak 15 Orang
4. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK sebanyak 159 lembaga/perusahaan.
5. Peningkatan Kapasitas PPLH sebanyak 10 Orang
6. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebanyak 2 kasus.
7. Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21 sebanyak 32 Kasus.
8. Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan sebanyak 5 Orang.

9. Layanan Umum sebanyak 1 Paket

10. Layanan Perkantoran sebanyak 1 Paket.

Penjelasan pencapaian pada 10 Indikator kinerja kegiatan, yaitu :

1. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan, dapat direalisasikan sebanyak 15 operasi dari target sebanyak 6 operasi atau 250%.
2. Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal, dapat direalisasikan sebanyak 15 operasi dari target sebanyak 6 operasi atau 250%.
3. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan, dapat direalisasikan sebanyak 22 orang dari target sebanyak 15 orang atau 146,67%.
4. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK sebanyak 212 perusahaan dari target sebanyak 159 perusahaan atau 133,33%.
5. Peningkatan Kapasitas PPLH, dapat direalisasikan sebanyak 25 orang dari target sebanyak 10 orang atau 250%.
6. Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani, dapat direalisasikan sebanyak 2 kasus dari target sebanyak 2 kasus atau 100%.
7. Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 terealisasi sebanyak 33 Kasus dari target sebanyak 32 Kasus atau 103,13%.
8. PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 14 orang dari target sebanyak 5 orang atau 280%.
9. Layanan Umum terealisasi sebanyak 1 Paket dari target sebanyak 1 Paket atau 100%.
10. Layanan Perkantoran, terealisasi sebanyak 1 Paket dari target sebanyak 1 Paket atau 100%.
11. Layanan Sarana Internal, terealisasi sebanyak 1 Paket dari target sebanyak 1 Paket atau 100%

Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023 sebagian besar memiliki nilai IKK dengan skor di atas 1, yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023 lebih bagus dari tahun 2022.

Sedangkan untuk capaian efisiensi penggunaan anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara tahun 2023, nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran 2023 untuk seluruh IKK dengan skor di atas 1; yang berarti penggunaan anggaran tahun 2023 efisien dalam mencapai sasaran kegiatan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2023. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban instansi BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yang memuat informasi mengenai kinerja Balai sepanjang Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dibuat dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53/M.PAN/2014.

Kami menyadari Laporan Kinerja (LKj) yang kami susun ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritikan dan saran yang membangun, kiranya dapat kami terima sebagai masukan untuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang akan datang dengan lebih baik lagi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2023 dan diharapkan laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, Januari 2024
Kepala Balai,

Iaquiuddin, S.Hut. M.P
NIP. 19740628 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kedudukan	1
1.2. Struktur Organisasi Balai	2
1.3. Sumber Daya Manusia	4
1.4. Isu Strategis 2023	6
1.5. Landasan Hukum	6
1.6. Tujuan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	7
2.2 Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	15
3.2 Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	53
DOKUMENTASI	54

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/ Golongan/ Ruang Sampai Akhir Desember 2025	5
2.	Tabel Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program.	9
3.	Rincian Usulan Target IKK selama 5 tahun (2020-2024).	12
4.	Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2023	13
5.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis Kegiatan Penegakan Hukum LHK Tahun 2023.	15
6.	Daftar Kasus Pidana LHK sampai Tahap P.21 Tahun 2023	18
7.	Daftar Hasil Pengawasan Tahun 2023	20
8.	Daftar Hasil Pengawasan berdasarkan Aduan Tahun 2023	24
9.	Daftar Operasi Pengamanan Hutan Tahun 2023	31
10.	Daftar Operasi Peredaran Hasil Hutan (TSL) Tahun 2023	35
11.	Daftar Operasi Peredaran Hasil Hutan (Illegal Logging) Tahun 2023	37
12.	Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2023 dengan Tahun 2022	39
13.	Capaian Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023	42
14.	Anggaran dan Realisasi DIPA BPPHLHK Wilayah Jabalnusra Tahun 2023	48

DAFTAR GRAFIK

No	Uraian	Hal
1.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai Akhir Desember 2023	5
2.	Perbandingan Target, Realisasi dan Prosentase Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023	17
3.	Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disingkat BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara memiliki wilayah kerja meliputi 9 (sembilan) Provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Kantor Pusat BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara berkedudukan di Jl. Bandara Juanda No. 100 Sidoarjo, Jawa Timur. Sedangkan Seksi Wilayah I Jakarta dengan wilayah kerja meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 9 Jakarta Pusat. Seksi Wilayah II Surabaya dengan wilayah kerja meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jl. Bandara Juanda No. 100 Sidoarjo, Jawa Timur, dan Seksi Wilayah III Kupang dengan wilayah kerja meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Jl. Frans Seda No. 14 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT.

BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan eselon III-a, sedangkan seksi wilayah dipimpin oleh seorang kepala seksi dengan eselon IV/a.

BPPLHK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;

2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
5. Pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
6. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan;
7. Pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
8. Pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
9. Fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
10. Pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
11. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
12. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

1.2. Struktur Organisasi Balai

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022, BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Seksi Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan; inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman; inventarisasi dan identifikasi potensi pelanggaran hukum; sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan terhadap pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan; koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya; pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan; pencegahan dan operasi pengamanan hutan; pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup; fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

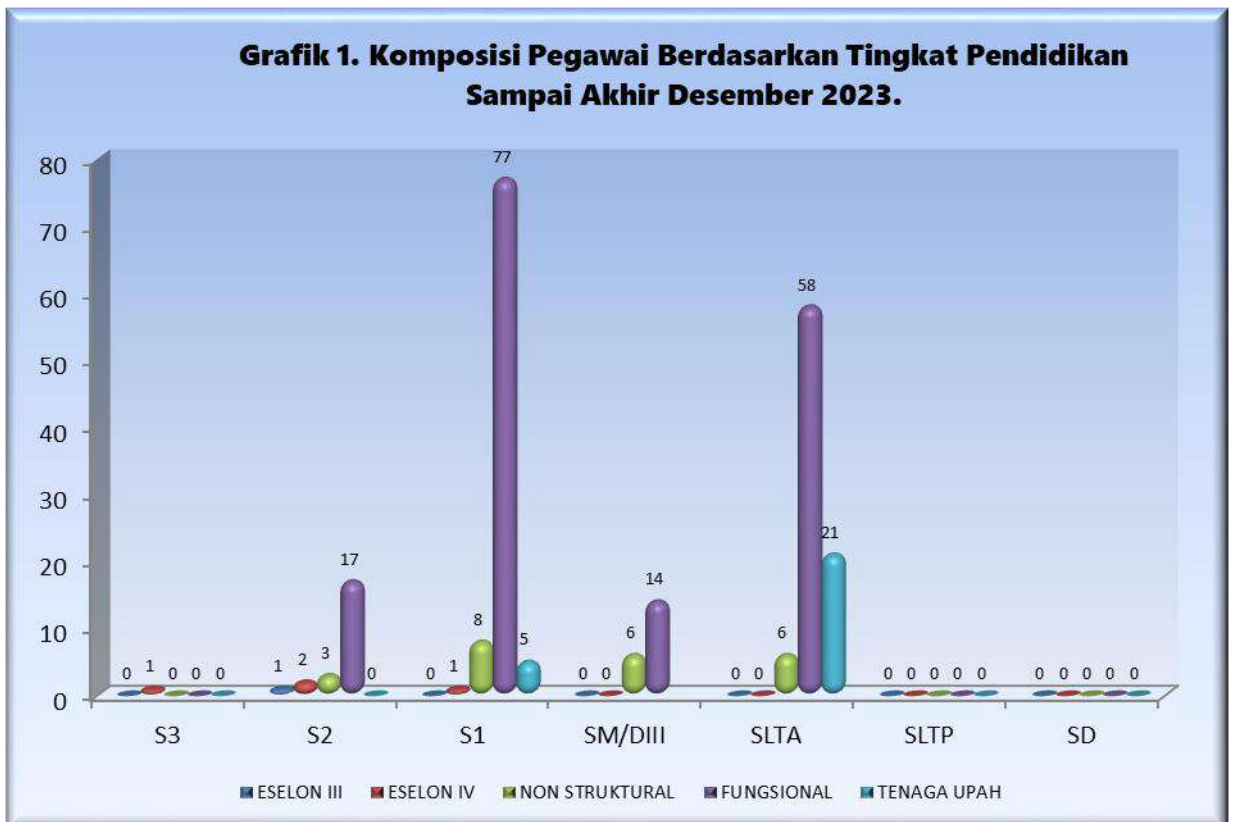
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM).

Jumlah pegawai BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara periode sampai akhir Desember 2023 sebanyak 220 orang terdiri dari 194 orang dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN), dan sebanyak 26 orang dengan status tenaga upah. Dilihat dari golongan, sebanyak 18 orang dengan golongan IV, sebanyak 153 orang golongan III, dan golongan II sebanyak 23 orang. Penyebaran pegawai sebanyak 63 orang berkantor di Jakarta-DKI Jakarta, sebanyak 99 orang berkantor di Surabaya-Jawa Timur dan sebanyak 58 orang berkantor di Kupang-NTT. Latar belakang pendidikan pegawai terdiri dari lulusan S3 sebanyak 1 (satu) orang, lulusan S2 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, S1 sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) orang, D3 sebanyak 20 (dua puluh) orang dan SLTA sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang, yang terinci menurut jenis kelamin Laki-laki sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) orang dan Perempuan 34 (tiga puluh empat) orang.

Tabel 1. Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/ Golongan/ Ruang Sampai Akhir Desember 2023

NO	JABATAN	GOLONGAN IV					GOLONGAN III					GOLONGAN II					GOLONGAN I					TOTAL	
		e	d	c	b	a	jml	d	c	b	a	jml	d	c	b	a	jml	d	c	b	a		jml
1	ESELON III	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						1
2	ESELON IV	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						4
3	NON STRUKTURAL	0	0	0	0	1	1	4	4	6	2	16	1	3	0	0	4						21
4	FUNGSIONAL																						
	a. POLHUT	0	0	1	2	5	8	16	37	23	20	96	4	5	0	8	17						121
	c. PPLH	0	0	1	1	2	4	7	8	14	6	35	0	0	0	0	0						39
	d. Pengelola PBJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2						3
	e. Humas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0						1
	f. Perencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0						1
	g. Pranata APBN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0						1
	e. Komputer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2						2
	JUMLAH	0	0	2	5	11	18	27	49	43	32	151	7	10	0	8	25						194



Penyebaran pegawai pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara adalah sebagai berikut :

a. Seksi Wilayah I Jakarta

Pegawai yang berkedudukan di Seksi Wilayah I Jakarta sampai akhir Desember 2023 sebanyak 63 orang pegawai. Terbagi dalam 2 lokasi, yaitu Jakarta dan Bandung

b. Seksi Wilayah II Surabaya

Pegawai yang ditempatkan di Seksi Wilayah II Surabaya sebanyak 69 orang, namun terbagi dalam 3 lokasi yaitu di Yogyakarta, Semarang dan Surabaya

c. Seksi Wilayah III Kupang

Pegawai yang ditempatkan di Seksi Wilayah III Kupang sebanyak 56 orang, dengan kedudukan di Kota Mataram, Labuan Bajo, Denpasar dan Kota Kupang.

d. Tata Usaha

Pegawai yang berkedudukan di Sub Bagian Tata Usaha Kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sebanyak 35 orang.

1.4. Sarana dan Prasarana

Pada akhir tahun 2023, rincian sarana dan prasarana yang telah dimiliki BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara adalah sebagaimana Lampiran 1.

Total nilai Barang Milik Negara pada BPPLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara sampai akhir Desember 2023 adalah sebesar Rp. 53.994.251.999,- yaitu terdiri dari Tanah Bangunan Kantor sebesar Rp. 10.532.438.000, peralatan dan mesin sebesar Rp. 36.059.448.7569,- Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 7.036.773.913,- Irigasi sebesar Rp. 110.102.000,- , Jaringan sebesar Rp. 44.848.000,- dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan sebesar Rp. 210.641.330,-

1.5. Isu Strategis 2023

Isu strategis yang muncul dan diharapkan dapat ditangani terkait penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun 2023 adalah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditangani melalui Penegakan Hukum.

Isu strategis lainnya terkait dengan kerawanan lingkungan hidup di Destinasi Prioritas Labuan Bajo, sehingga sedang dibangun Kantor Pusat Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

1.6. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, adalah :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.7. Tujuan

Laporan Kinerja BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara 2023 disusun dengan tujuan :

- a. Dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- b. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (selanjutnya disingkat dengan RPJMN 2020-2024) telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut ditegaskan kembali bahwa RPJMN merupakan arahan bagi seluruh kementerian dalam penyusunan rencana strategisnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menindaklanjuti.

RPJMN 2020-2024 menjadi dasar penetapan Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024. Tujuan Kementerian LHK diwujudkan oleh seluruh unit-unit kerjanya melalui pencapaian serangkaian sasaran, secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi. Adapun penentuan sasaran-sasaran termaksud di atas dilakukan dalam bingkai ranah tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, dengan mengacu pada Renstra Kementerian LHK 2020-2024, serta dengan strategi yang didasarkan pada potensi dan permasalahan. Sedangkan pengertian "sasaran" dalam dokumen ini mengacu pada pedoman penyusunan Renstra di jajaran Kementerian LHK.

Sasaran adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian dan unit-unit kerjanya secara berantai dan berjenjang. Sasaran Strategis Kementerian LHK untuk kurun waktu tahun 2020-2024, sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan

- kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
 4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Kementerian LHK 2020- 2024 merupakan kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang dari gabungan beberapa program yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di dalam lingkungannya. Berdasarkan hal itu, Kementerian LHK menetapkan sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Sasaran Strategis Kementerian LHK yang diturunkan langsung terhadap Ditjen Gakkum LHK adalah sasaran strategis ke-empat, yaitu "Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing". Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan langsung untuk Ditjen Gakkum LHK adalah IKU 14 yakni "Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditangani melalui Penegakan Hukum" dan IKU 18 yaitu "Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK" yang berlaku kepada

semua kegiatan Dukungan Manajemen. Meski demikian, secara tidak langsung Ditjen Gakkum LHK turut berkontribusi terhadap IKU dan Sasaran Strategis lainnya.

Sasaran Strategis Ditjen Gakkum LHK adalah sebagai berikut:

- a. Teramankannya lingkungan hidup dan kehutanan dari gangguan dan ancaman;
- b. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Tersesainya penanganan kasus dan/atau perkara bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang responsif, berpelayanan prima dan akuntabel.

Program Prioritas Ditjen Gakkum LHK antara lain Dukungan Manajemen, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Kualitas Lingkungan Hidup. Dalam mencapai Program Prioritas tersebut dapat digambarkan dari tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Tabel Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program.

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKP/IKK)
Program 029.WA : Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen Gakkum
Kegiatan 5427 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai SAKIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Level maturitas SPIP Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKP/IKK)
		Laporan keuangan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program 029.FF : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
	Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman	Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman
Kegiatan 5428 : Pencegahan dan Pengamanan Hutan		
	Telaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar
Program 029.FD : Kualitas Lingkungan Hidup		
	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan
	Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani
Kegiatan 5429 : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		
	Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator (IKP/IKK)
Kegiatan 5430 : Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi		
	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK
	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya
Kegiatan 5431 : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap
	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya

Adapun kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam mendukung tercapainya Program Prioritas Ditjen Gakkum LHK Tahun 2020-2024 antara lain:

- a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen PHLHK, output kegiatannya antara lain:
 - Layanan dukungan manajemen UPT
 - Layanan perkantoran
- b. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan, output kegiatannya antara lain:
 - Jumlah operasi pengamanan hutan
 - Jumlah operasi peredaran hasil hutan
 - Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya
- c. Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, output kegiatannya antara lain:
 - Peningkatan Kapasitas PPLH
 - Pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi yang ditangani

- Pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi terkait DAS Citarum yang ditangani
- d. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, output kegiatannya antara lain:
 - Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21
 - Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya

Berdasarkan penjabaran di atas, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Bali Nusa Tenggara menyusun rencana target pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan selama 5 (lima) tahun mulai dari Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Rincian Usulan Target IKK selama 5 tahun (2020-2024).

No	Indikator Kinerja Kegiatan (Satuan)	Target Capaian IKK (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Layanan dukungan manajemen UPT (Layanan)	1	1	1	1	1
2	Layanan perkantoran (Layanan)	1	1	1	1	1
3	Jumlah Operasi Pengamanan Hutan (Operasi)	11	14	16	18	20
4	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan (Operasi)	21	47	56	71	75
5	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	105	109	112	116
6	Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi yang ditangani (Perusahaan)	170	255	288	331	357
7	Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi yang ditangani terkait DAS Citarum (Perusahaan)	40	66	76	87	92
8	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (Kasus)	24	38	44	49	59
9	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	4	5	5	8	8

2.2 Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sesuai dengan Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa dalam satu eselon 1 pada Kementerian/Lembaga bertanggung jawab terhadap 1 (satu) program.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa program yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum adalah Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai UPT Direktorat Jenderal Penegakan Hukum wajib menjalankan program dimaksud. Hal tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan perubahannya antara Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK dan Kepala BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

Sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum tahun 2020-2024 salah satunya adalah indikator kinerja kegiatan yang dimandatkan kepada Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 2023 sebagaimana tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN IKK TAHUN 2023 AWAL	TARGET CAPAIAN IKK TAHUN 2023 REVISI
1.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan Perkantoran)	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker UPT (Layanan Umum)	1 Layanan	1 Layanan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN IKK TAHUN 2023 AWAL	TARGET CAPAIAN IKK TAHUN 2023 REVISI
2.	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan terhadap gangguan dan ancaman di 34 Provinsi.	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	5 Operasi	5 Operasi
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	6 Operasi	6 Operasi
		Peningkatan Kapasitas Polisis Kehutanan	15 orang	15 orang
3.	Meningkatnya efektivitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Peningkatan Kapasitas PPLH	10 Orang	10 Orang
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	124 Perusahaan	159 Perusahaan
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK di DAS Citarum	0 Perusahaan	0 Perusahaan
4.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	0 Kasus	2 Kasus

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN IKK TAHUN 2023 AWAL	TARGET CAPAIAN IKK TAHUN 2023 REVISI
5	Meningkatnya efektivitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21	32 Kasus	33 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan	5 Orang	5 Orang

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

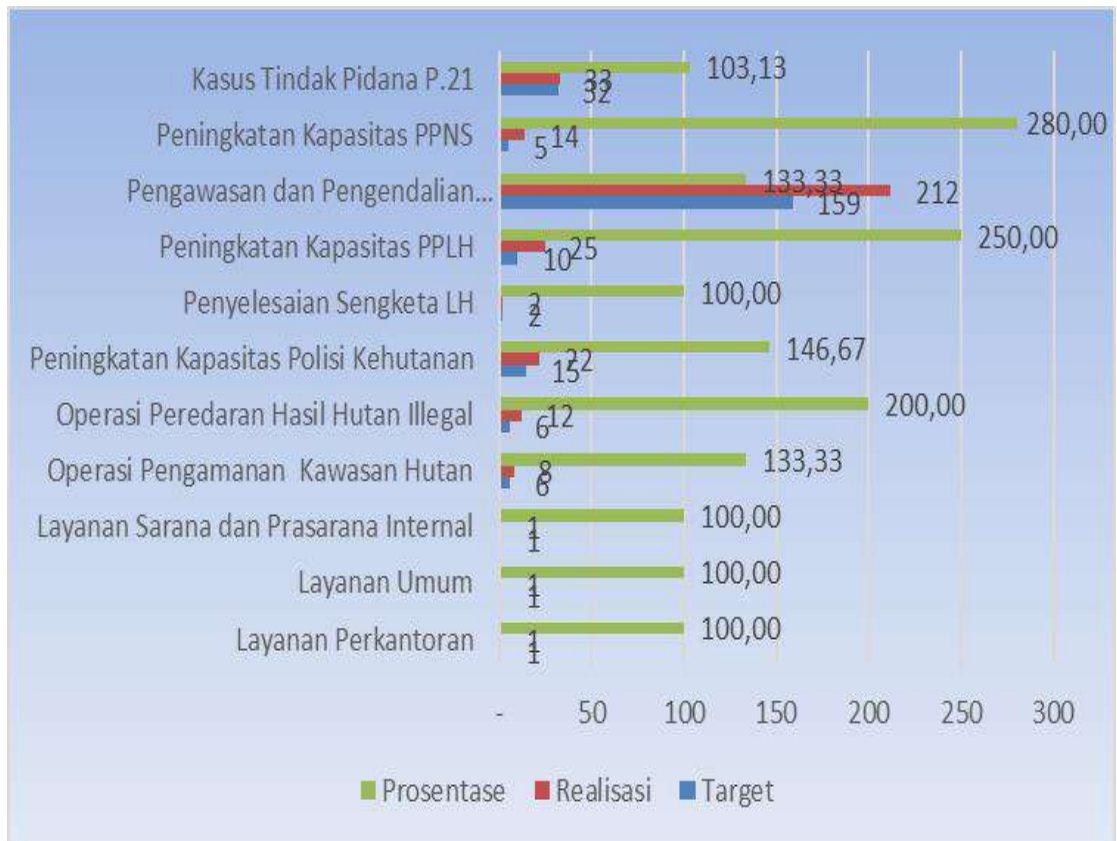
Capaian kinerja BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 2023 sebagaimana terinci dalam tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Strategis Kegiatan Penegakan Hukum LHK Tahun 2023.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	IKK TAHUN 2023	
			TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
2.	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	6 Operasi	15 Operasi
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	6 Operasi	15 Operasi
		Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	15 Orang	22 Orang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	IKK TAHUN 2022	
			TARGET	REALISASI
3.	Meningkatnya efektivitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	159 Perusahaan	212 Perusahaan
		PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	25 Orang
4.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	2 Kasus	2 Kasus
5.	Meningkatnya efektivitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21	32 Kasus	33 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan	5 Orang	14 Orang

Grafik 2. Perbandingan Target, Realisasi dan Prosentase Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023.



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian kinerja dari 11 (sebelas) indikator kinerja tahun 2022 yaitu:

- A. Layanan Perkantoran, yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor dapat dilaksanakan selama 12 bulan atau 100 %.
- B. Layanan umum, yang meliputi penyusunan rencana program anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan kepegawaian, dapat dilaksanakan selama 12 bulan atau 100 %.
- C. Layanan Sarana dan Prasarana Internal, yang meliputi Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi serta Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran, dapat dilaksanakan semuanya atau 100%.

- D. Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan terealisasi sebanyak 14 orang dari target sebanyak 5 orang atau 280%.
- E. Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21 terealisasi 33 kasus dari target sebanyak 32 kasus atau 103,13%, dengan perincian :

Tabel 6. Daftar Kasus Pidana LHK sampai Tahap P.21 Tahun 2023.

NO.	TIPOLOGI KASUS	LOKASI				TERSANGKA	P.21
		DESA	KEC.	KAB./KOTA	PROV.		
1	Illegal Logging	Oi Bura	Tambora	Bima	NTB	Hardiyanto	B-538/N.2.4/Eku.1/02/2023; 22 Februari 2023
2	TSL	Jati sampurna	Jatisampurna	Bekasi	Jawa Barat	Mohamad Rijal	B-1091/M.2.17/Enz.1/03/2023; 14 Maret 2023
3	Illegal Logging	Tambak Langon	Asemrowo	Surabaya	Jawa Timur	Supriyono	B-2113/M.5.4/Eku.1/3/2023; 14 Maret 2023
4	TSL	Parkiran Hotel Cibubur Inn, Cibubur	Jatisampurna	Bekasi	Jawa Barat	Ramdani bin Imin	B-1092/M.2.17/Enz.1/03/2023; 14 Maret 2023
5	Illegal Logging	Sumberrejo	Banyuputih	Situbondo	Jawa Timur	Abd Karim dan Budiono	B-3379/M.5.4/Eku.1/5/2023 Tanggal 19 Mei 2023
6	Tumbuhan dan Satwa Liar	Terminal Internasional Bandara Juanda	Sedati	Sidoarjo	Jawa Timur	David Setiawan	B-3675/M.5.4/Eku.1/5/2023 Tanggal 31 Mei 2023
7	Perambahan Kawasan	TWA Ruteng Desa Satar Nawang	Congkar	Manggarai Timur	NTT	Mikael Ane	B-581/N.3.17/Eku.1/5/2023 Tanggal 5 Juni 2023
8	Perambahan dalam Kawasan	Teta	Lambitu	Bima	NTB	Jufrin	B-2031/N.2.4/Eku.1/07/2023; 12 Juli 2023
9	Illegal Logging	Perum Perhutani Banyuwangi Utara	Banyuputih	Situbondo	Jawa Timur	Yudi Hartono bin Sunaryo	B-3896/M.5.4/Eku.1/6/2023 Tanggal 8 Juni 2023
10	Illegal Logging	Perum Perhutani KPH Situbondo	Arjasa	Situbondo	Jawa Timur	Abdul Jalil, Hadi Cahyono, dan Yanto	B-5385/M.5.4/Eku.1/8/2023 Tanggal 9 Agustus 2023
11	TSL	Kota Kupang	Cargo Bandara El-tari Kupang	Kupang	NTT	Markus Manek	B-2508/N.3.1/Eku.1/08/2023 Tanggal 10 Agustus 2023
12	Limbah B3	Kembang Kuning	Klapanunggal	Bogor	Jawa Barat	PT. Ficamp Indo Sentosa Jaya	B.2556/M.2.18/Eku.1/08/2023; 23 Agustus 2023
13	Illegal Logging	Perak Barat	Krempangan	Surabaya	Jawa Timur	CV. Aditamah Mandiri	B/5732/M.5.4/Eku.1/8/2023; 30 Agustus 2023
14	Illegal Logging	Mantang	Batukliang	Lombok Tengah	NTB	Sapi'i dkk	B-2791/N.2.4/Eku.1/09/2023; 12 September 2023
15	Limbah B3	Gunung Putri	Gunung Putri	Bogor	Jawa Barat	PT. Tekno Olah Pangan	B-2888/M.2.18/Eku.1/09/2023 : 18 September 2023

NO.	TIPOLOGI KASUS	LOKASI				TERSANGKA	P.21
		DESA	KEC.	KAB./KOTA	PROV.		
16	Limbah B3	Gunung Putri	Gunung Putri	Bogor	Jawa Barat	PT. Bintang Prima Perkasa	B-2933/M.2.18/Eku.1/09/2023 : 20 September 2023
17	Illegal Logging	Wonorejo	Banyuputih	Situbondo	Jawa Timur	Hadi Sukamto	B-6377/M.5.4/Eku.1/10/2023; 4 Oktober 2023
18	Tumbuhan dan Satwa Liar	Pakukerto	Sukokerjo	Pasuruan	Jawa Timur	Muchammad Faizal Ibrahim	B-6422/M.5.4/Eku.1/10/2023; 5 Oktober 2023
19	Illegal Logging	Perak Barat	Krempangan	Surabaya	Jawa Timur	CV. Gefariel	B-6456C/M.5.4/Eku.1/10/2023; 9 Oktober 2023
20	Illegal Logging	Perak Barat	Krempangan	Surabaya	Jawa Timur	CV. Wami Start	B-6456D/M.5.4/Eku.1/10/2023; 9 Oktober 2023
21	Illegal Logging	Perak Barat	Krempangan	Surabaya	Jawa Timur	PT. Eka Dwika Perkasa	B-6456E/M.5.4/Eku.1/10/2023; 9 Oktober 2023
22	Illegal Logging	Perak Barat	Krempangan	Surabaya	Jawa Timur	PT. Guraja Mandiri Perkasa	B-6456F/M.5.4/Eku.1/10/2023; 9 Oktober 2023
23	Limbah B3	Jeruk	Kibin	Serang	Banten	Benny Salim Saputra, SE	B-4812/M.6.10/Eku.1/10/2023; 17 Oktober 2023
24	Limbah B3	Jeruk	Kibin	Serang	Banten	PT. Xingye Logam Indonesia	B-4814/M.6.10/Eku.1/10/2023; 17 Oktober 2023
25	Tumbuhan dan Satwa Liar	Peteron, RT 002 RW 008, Jebres	Jebres	Surakarta	Jawa Tengah	Fadil Ammar Salim Bin Khairuddin	B-7093/M.5.4/Eku.1/11/2023; 8 Nopember 2023
26	TSL	Cilangkap	Tapos	Depok	Jawa Barat	Maristria Mahir Prakoso	B-6084/M.5.4/Eku.1/11/2023; 6 Nopember 2023
27	TSL	Karang setia	Karang Bahagia	Bekasi	Jawa Barat	Rizki Riau bin Niman (alm)	B-6399/M.2.4/Eku.1/11/2023; 17 November 2023
28	Illegal Logging	Desa Katua	Dompu	Dompu	NTB	Maman	B-3613/N.2.4/Eku.1/11/2023; 24 Nopember 2023
29	Tumbuhan dan Satwa Liar	Jl. Jagir Sido resmo VII No. 79	-	Surabaya	Jawa Timur	Ardi Fahreza	B-7663A/M.5.4/Eku.1/12/2023; 7 Desember 2023
30	Tumbuhan dan Satwa Liar	Kopeng	Getasan	Semarang	Jawa Tengah	Gading Putra Iawayunda	B-5731/M.3.4/Eku.1/12/2023; 11 Desember 2023
31	Limbah B3	Kareo	Jawilan	Serang	Banten	PT. Datong Lightway International Technology	B-6007/M.6.10/Eku.1/12/2023, Tanggal 28 Desember 2023
32	Limbah B3	Limus Nunggal	Cileungsi	Bogor	Jawa Barat	PT. Hua Xing Industri	B-4299/M.2.18/Eku.1/12/2023, Tanggal 29 Desember 2023
33	Illegal Logging	Desa Madaprana	Kecamatan Woja	Kabupaten Dompu	NTB	Deni Efiyanto	B-3996/N.2.4/Eku.1/12/2023; 29 Desember 2023

- F. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK sebanyak 212 lembaga/perusahaan dari target sebanyak 159 lembaga/perusahaan atau 133,33%, dengan rincian sebanyak 118 izin dari pengawasan, dan sebanyak 94 lembaga/perusahaan dari penanganan pengaduan perusahaan sebagaimana tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Daftar Hasil Pengawasan Tahun 2023.

No	Nama Perusahaan	Kabupaten	Provinsi	Tanggal Pelaksanaan	Hasil
1	PT Caprifarmindo Laboratories	Bandung Barat (Kab)	Jawa Barat	08-Mar-23	Taat
2	PT Jaya Mukti Mandiri	Bekasi (Kab)	Jawa Barat	08-Mar-23	Tidak Taat
3	PT Afan Logam Lestari	Jombang (Kab)	Jawa Timur	08-Mar-23	Taat
4	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Intan Cilacap	Cilacap (Kab)	Jawa Tengah	08-Mar-23	Taat
5	PT Karabha Wiratama	Tegal (Kab)	Jawa Tengah	15-Mar-23	Taat
6	PT Harapan Baru Sejahtera Plastik	Bekasi (Kab)	Jawa Barat	15-Mar-23	Tidak Taat
7	PT Sinar Garuda Makmurindo	Gresik (Kab)	Jawa Timur	15-Mar-23	Tidak Taat
8	PT Muhmotas	Bekasi (Kab)	Jawa Barat	04-Apr-23	Taat
9	PT Citra Cakra Logam	Pasuruan (Kab)	Jawa Timur	04-Apr-23	Tidak Taat
10	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri - Cibitung Transfer Station	Bekasi (Kab)	Jawa Barat	04-Apr-23	Taat
11	PT Dharpadina Sumber Abadi	Karawang (Kab)	Jawa Barat	04-Apr-23	Tidak Taat
12	PT Rama Manunggal Perkasa	Bekasi (Kab)	Jawa Barat	12-Apr-23	Tidak Taat
13	PT Bangunperkasa Adhitamasentra	Jombang (Kab)	Jawa Timur	12-Apr-23	Tidak Taat
14	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Tembaga	Probolinggo	Jawa Timur	12-Apr-23	Tidak Taat
15	PT Surya Abadi Saputra Perkasa	Kab. Jombang	Jawa Timur	15 Mar-23	Tidak Taat
16	PT Anggrek Mas Textile	Kab. Bandung	Jawa Barat	10-May-23	Tidak Taat
17	PT New Ramon Star	Kab.Pati	Jawa Tengah	10-May-23	Tidak Taat
18	PT Dover Chemical	Kota Cilegon	Banten	8-May-23	Taat
19	PT Universal Eco Pacific	Kab. Serang	Banten	11-May-23	Taat
20	PT Semen Jawa	Kab. Sukabumi	Jawa Barat	15-May-23	Taat
21	PT Warna Mandiri	Kab. Bandung Barat	Jawa Barat	22-May-23	Tidak Taat
22	PT Vitabiotics Healthcare	Kab. Bandung Barat	Jawa Barat	25-May-23	Tidak Taat
23	PT Bata Kuo Shin	Kab.Karawang	Jawa Barat	22-May-23	Taat
24	PT Bangunperkasa Adhimatasentra (Karawang)	Kab. Karawang	Jawa Barat	22-May-23	Tidak Taat
25	CV Indo Jaya Pratama	Kab. Banyuwangi	Jawa Timur	23-May-23	Tidak Taat
26	PT Alam Sinar	Kab. Malang	Jawa Timur	24-May-23	Taat
27	PT Liman Jaya Anugrah	Kab. Pasuruan	Jawa Timur	29-May-23	Taat
28	PT Perfect International Food	Kab. Banyuwangi	Jawa Timur	29-May-23	Tidak Taat

No	Nama Perusahaan	Kabupaten	Provinsi	Tanggal Pelaksanaan	Hasil
29	PT Stiadi Utama Sejahtera	Kota Adm Jakarta Utara	DKI Jakarta	8-June-23	Taat
30	PT Sun Tak Indonesia	Kab. Bogor	Jawa Barat	5-June-23	Tidak Taat
31	PT Trinitan Metals And Minerals Tbk	Kab. Bogor	Jawa Barat	8-June-23	Tidak Taat
32	PT Putra Nusantara Mandiri	Kab. Sidoarjo	Jawa Timur	12-June-23	Tidak Taat
33	PT Gramitrama Battery	Kab. Sidoarjo	Jawa Timur	14-June-23	Tidak Taat
34	PT Indo Bharat Rayon	Kab. Purwakarta	Jawa Barat	12-June-23	Tidak Taat
35	PT Widurini Sayang Bunda (RSIA Bunda Fathia)	Kab. Purwakarta	Jawa Barat	14-June-23	Taat
36	PT Cing Khai Lie	Kab. Tangerang	Banten	22-June-23	Tidak Taat
37	PT Sinar Laut Bitu Logam Perkasa Jaya	Kab. Tangerang	Banten	19-June-23	Tidak Taat
38	PT Krakatau Steel	Kota Cilegon	Banten	19-June-23	Tidak Taat
39	PT Semen Jakarta	Kota Cilegon	Banten	22-June-2023	Taat
40	PT Arjuna Utama Kimia	Kota Surabaya	Jawa Timur	05-Jul-23	Taat SA
41	PT Karyahidup Jayantara	Kab. Bandung Barat	Jawa Barat	04-Jul-23	Tidak Taat SA
42	PT Harika Metal Makmur	Kab. Tangerang	Banten	05-Jul-23	Tidak Taat SA
43	PT Alux Indah Pratama	Kota Tangerang	Banten	12-Jul-23	Tidak Taat SA
44	PT Anugrah Mutu Bersama	Kab. Subang	Jawa Barat	11-Jul-23	Tidak Taat SA
45	PT Garindo Persada Betiga	Kab. Cirebon	Jawa Barat	11-Jul-23	Taat SA
46	PT Karya Tangguh Multi Kencana	Kab. Tangerang	Banten	26-Jul-23	Taat SA
47	PT Jaya Mulya Mandiri	Kab. Bekasi	Jawa Barat	02-Aug-23	Taat SA
48	PT Barco	Kota Administrasi Jakarta Utara	DKI Jakarta	02-Aug-23	Tidak Taat SA
49	PT Yuna Mandiri Plosokandang	Kab. Tulungagung	Jawa Timur	02-Aug-23	Tidak Taat SA
50	PT Jaya Jagat Raya	Kab. Sidoarjo	Jawa Timur	07-Aug-23	Taat SA
51	PT Steel Pipe Industry of Indonesia	Kota Surabaya	Jwa Timur	07-Aug-23	Taat SA
52	PT San Fu Indonesia	Kab. Purwakarta	Jawa Barat	07-Aug-23	Tidak Taat SA
53	Koperasi Keluarga Kasepuhan Sejahtera	Kab. Indramayu	Jawa Barat	07-Aug-23	Taat SA
54	RSUD Dr. Soedjono Selong	Kab. Lombok Timur	NTB	08-Aug-23	Taat SA
55	PT Ritek energi Lestari	Kab. Gresik	Jawa Timur	14-Aug-23	Tidak Taat SA
56	PT Berlian Manyar Sejahtera	Kab. Gresik	Jawa Timur	14-Aug-23	Taat SA
57	PT Asama Indonesia	Kab. Bekasi	Jawa Barat	14-Aug-23	Taat SA
58	PT Sumi Win Mukti	Kab. Bekasi	Jawa Barat	14-Aug-23	Tidak Taat SA
59	PT Sung Shim International	Kab. Purbalingga	Jawa Tengah	21-Aug-23	Tidak Taat SA
60	PT Adhimix RMC Plant	Kab. Cilacap	Jawa Tengah	21-Aug-23	Taat SA

No	Nama Perusahaan	Kabupaten	Provinsi	Tanggal Pelaksanaan	Hasil
61	PT Sagraha Satya Sawahita	Kab. Banyuwangi	Jawa Timur	21-Aug-23	Taat SA
62	PT Bahari Makmur Sejati	Kab. Banyuwangi	Jawa Timur	21-Aug-23	Taat SA
63	PT Sumber Air Sejahtera	Kab. Probolinggo	Jawa Timur	21-Aug-23	Tidak Taat SA
64	PT Semen Bosowa Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	Jawa Timur	21-Aug-23	Taat SA
65	PT Hijau Alam Nusantara	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	21-Aug-23	Taat SA
66	PT Mitra Mandiri Sejahtera Sentosa	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	21-Aug-23	Tidak Taat SA
67	PT Pumas Rotua Gemilang	Kab. Tangerang	Banten	21-Aug-23	Tidak Taat SA
68	PT Rapisarana Texpro	Kab. Bogor	Jawa Barat	21-Aug-23	Taat SA
69	PT Trijaya Adymix	Kab. Nganjuk	Jawa Timur	28-Aug-23	Tidak Taat SA
70	CV Wahana Sejahtera Foods	Kab. Jombang	Jawa Timur	28-Aug-23	Tidak Taat SA
71	PT Radel Khalishan Alamindo	Kab. Bandung	Jawa Barat	28-Aug-23	Tidak Taat SA
72	PT Dhanar Mas Concern III	Kab. Bandung	Jawa Barat	28-Aug-23	Taat SA
73	PT Prima Parquet Indonesia	Kab. Karanganyar	Jawa Tengah	29-Aug-23	Tidak Taat SA
74	PT Nishikawa Karya Indonesia	Kab. Sumedang	Jawa Barat	28-Aug-23	Taat SA
75	PT Indo Pacific	Kab. Bandung	Jawa Barat	28-Aug-23	Taat SA
76	RS St Carolus Borromeus	Kota Kupang	NTT	05-Sep-23	Taat SA
77	PT Conbloc Internusa	Kab. Purwakarta	Jawa Barat	04-Sep-23	Tidak Taat SA
78	PT Adhimix Precast Indonesia Plant Delta Mas	Kab. Bekasi	Jawa Barat	04-Sep-23	Tidak Taat SA
79	PT Pan Asia Jaya Abadi	Kab. Bandung	Jawa Barat	11-Sep-23	Taat SA
80	PT Sempurnaindah Multinusantara	Kab. Bandung	Jawa Barat	11-Sep-23	Taat SA
81	PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Juanda	Kab. Sidoarjo	Jawa Timur	11-Sep-23	Tidak Taat SA
82	PT Prima Alloy Steel Universal	Kab. Sidoarjo	Jawa Timur	11-Sep-23	Tidak Taat SA
83	PT Central Sandang Prima	Kab. Sumedang	Jawa Barat	18-Sep-23	Tidak Taat SA
84	PT Indobuana Makmur Textile	Kab. Bandung	Jawa Barat	18-Sep-23	Tidak Taat SA
85	PT Garuda Mas Semesta	Kota Cimahi	Jawa Barat	18-Sep-23	Tidak Taat SA
86	PT Famatex	Kota Cimahi	Jawa Barat	18-Sep-23	Taat SA
87	PT Sun Paper Source	Kab. Mojokerto	Jawa Timur	18-Sep-23	Taat SA
88	PT Merak Jaya Beton	Kota Surabaya	Jawa Timur	18-Sep-23	Tidak Taat SA
89	Rumah Sakit Umum Daerah Baá	Kab. Rote Ndao	NTT	18-Sep-23	Tidak Taat SA
90	PT Indowira Putra	Kab. Cimahi	Jawa Barat	19-Sep-23	Taat SA

No	Nama Perusahaan	Kabupaten	Provinsi	Tanggal Pelaksanaan	Hasil
91	PT Sinar Alindo Metal	Kota Administrasi Jakarta Barat	DKI Jakarta	25-Sep-23	Taat SA
92	PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Tanjung Wangi	Kab. Banyuwangi	Jawa Timur	28/03/2023	Tidak Taat
93	PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Tenau	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	28/03/2023	Tidak Taat
94	PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Bandung Group - Padalarang	Kab. Bandung Barat	Jawa Barat	28/03/2023	Tidak Taat
95	PT Pertamina Patra Niaga DPPU Husein Sastranegara	Kota Bandung	Jawa Barat	28/03/2023	Tidak Taat
96	PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tanjung Gerem	Kota Cilegon	Banten	28/03/2023	Tidak Taat
97	PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	28/03/2023	Tidak Taat
98	PT Usaha Sukses Mandiri	Kabupaten Tabanan	Bali	14/04/2023	Tidak Taat
99	PT Usahatani Lestari	Kab. Bima dan Kab. Dompu	Bali	15/05/2023	Tidak Taat
100	PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Madiun	Kota Madiun	Jawa Timur	06/06/2023	Tidak Taat
101	PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Manggis	Kab. Karangasem	Bali	06/06/2023	Tidak Taat
102	PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Larantuka	Kab. Flores Timur	Nusa Tenggara Timur	06/06/2023	Tidak Taat
103	PT Pertamina Patra Niaga Soekarno Hatta Fuel Terminal & Hydrant Installation (SHAFTI)	Kota Tangerang	Banten	06/06/2023	Tidak Taat
104	PT Pertamina Patra Niaga MWH & LPG Cylinder Manufacturing	Kota Adm Jakarta Utara	DKI Jakarta	05/06/2023	Tidak Taat
105	PT Wiraswasta Gemilang Indonesia	Kab. Sidoarjo	Jawa Timur	13/06/2023	Taat
106	PT Umbul Mulyo	Kota Semarang	Jawa Tengah	20/06/2023	Tidak Taat
107	PT Pendawa Mandiri Sejahtera	Kabupaten Kediri	Jawa Timur	4/7/2023	Tidak Taat
108	PT Esa Sampoerna Agro	Kabupaten Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	4/7/2023	Tidak Taat
109	PT Banyuwangi Cannery	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	25/7/2023	Tidak Taat
110	PT Cosmoprof Indokarya	Kecamatan Pemasang	Jawa Tengah	11/7/2023	Tidak Taat
111	PT Metatu Nusantara Jaya	Kabupaten Gresik	Jawa Timur	25/7/2023	Tidak Taat
112	PT Datong Lightway International Technology	Kab. Serang	Banten	12/9/2023	Tidak Taat
113	PT Indolumas Grease	Kota Adm Jakarta Utara	DKI Jakarta	29/9/2023	Tidak Taat
114	PT Angkasa Pura I (Persero) - Boyolali	Kab. Boyolali	Jawa Tengah	26/9/2023	Tidak Taat
115	PT Tiga Lancar Banten	Kota Cilegon	Banten	3/10/2023	Tidak Taat
116	PT Pelabuhan Cilegon Mandiri	Kota Cilegon	Banten	3/10/2023	Tidak Taat
117	PT Altikamurni Internusa	Kab. Bekasi	Jawa Barat	10/10/2023	Tidak Taat
118	PT Anggana Kurnia Putra	Kab. Bandung	Jawa Barat	7/11/2023	Tidak Taat

Tabel 8. Daftar Hasil Pengawasan berdasarkan Aduan Tahun 2023.

No	Nomor Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Nama Terlapor	Kabupaten/Kota	Uraian Pengaduan
1	230816	29-Okt-2023	PT Insol Era Dunia	KABUPATEN PASURUAN	DLH Kabupaten Pasuruan menerima pengaduan dari PT Alwinda Pratama Jaya terkait pencemaran udara yang diduga berasal dari aktivitas PT Insol Era Dunia, dari debu pembakaran produksi arang yang menghasilkan banyak asap dan serbuk/debu yang mengarah ke perusahaan.
2	230805	25-Sep-2023	PT Kebun Tebu Mas	KABUPATEN LAMONGAN	Dugaan PT Kebun Tebu Mas tidak melakukan pengelolaan Limbah B3 Fly ash dan Bottom Ash yang dihasilkannya
3	230804	30-Okt-2023	CV Almenta	KABUPATEN GRESIK	Dugaan CV Almenta menerima kayu olahan dan kayu gergajian yang tidak sesuai izin, menerima kayu bulat tanpa barcode V-Legal, dan menerima kayu bulat yang tidak jelas asal usulnya
4	230747	12-Okt-2023	Sdr. Steven Sutiono	KABUPATEN JEPARA	1. Dugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh Sdr. Steven Sutiono di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. Tidak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. Terdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
5	230745	12-Okt-2023	PT Putra Barokah Success	KABUPATEN JEPARA	1. Dugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh PT Putra Barokah Success di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. Tidak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. Terdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
6	230735	12-Okt-2023	Sdr. Kasturi 2	KABUPATEN JEPARA	1. Dugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh Sdr. Kasturi 2 di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. Tidak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. Terdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
7	230734	12-Okt-2023	Sdr. Turnadi	KABUPATEN JEPARA	1. Dugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh Sdr. Turnadi di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. Tidak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. Terdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
8	230711	09-Jul-2023	PT Daiki Aluminium Industry	KABUPATEN KARAWANG	PT Daiki merupakan perusahaan PMA Jepang yang bergerak di bidang industri peleburan aluminium, memproduksi ingot aluminium dengan limbah B3 yang dihasilkan salah satunya slag aluminium (B313-2). PT Daiki diduga tidak menyerahkan limbah B3 yang dihasilkan kepada pihak ketiga yang tidak berizin.
9	230707	02-Okt-2023	PT Chemical Industry Tonggorejo	KABUPATEN PASURUAN	Diduga PT Chemical Industry Tonggorejo diduga tidak memiliki izin lingkungan, tidak memiliki izin pembuangan air limbah, dan membuang air limbah melebihi baku mutu yang dipersyaratkan
10	230702	12-Okt-2023	Sdr. Suroto 2	KABUPATEN JEPARA	1. Dugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh Sdr. Suroto 2 di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. Tidak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. Terdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
11	230699	12-Okt-2023	Sdr. Ali Muarif 2	KABUPATEN JEPARA	1. Dugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh Sdr. Ali Muarif 2 di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. Tidak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. Terdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
12	230698	12-Okt-2023	Sdr. Suroto 1	KABUPATEN JEPARA	1. Dugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh Sdr. Suroto 1 di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. Tidak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. Terdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
13	230696	12-Okt-2023	Sdr. Faisol	KABUPATEN JEPARA	1. Dugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh Sdr. Faisol di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. Tidak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. Terdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
14	230695	12-Okt-2023	Sdr. Ali Muarif 1	KABUPATEN JEPARA	1. Dugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh Sdr. Ali Muarif 1 di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. Tidak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. Terdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.

No	Nomor Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Nama Terlapor	Kabupaten/Kota	Uraian Pengaduan
15	230694	12-Okt-2023	CV Pande Une Empat Enam	KABUPATEN JEPARA	1. D ugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh CV Pande Une Empat Enam di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. T idak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. T erdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
16	230693	12-Okt-2023	Sdr. Endang Saefudin 1	KABUPATEN JEPARA	1. D ugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh Sdr. Endang Saefudin 1 di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. T idak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. T erdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
17	230692	12-Okt-2023	Sdr. Sujono	KABUPATEN JEPARA	1. D ugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh Sdr. Sujono di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. T idak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. T erdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
18	230691	12-Okt-2023	Sdr. M Ishadul Khaq	KABUPATEN JEPARA	1. D ugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh Sdr. M Ishadul Khaq di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. T idak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. T erdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
19	230690	12-Okt-2023	PT Indo Bahari Sejahtera	KABUPATEN JEPARA	1. D ugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh PT Indo Bahari Sejahtera di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. T idak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. T erdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
20	230689	12-Okt-2023	CV Sukses Abadi Tambak Udang	KABUPATEN JEPARA	1. D ugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh CV Sukses Abadi Tambak Udang di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. T idak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. T erdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
21	230687	12-Okt-2023	PT Karimun Real Estate	KABUPATEN JEPARA	1. D ugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh PT Karimun Real Estate di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. T idak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. T erdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
22	230679	12-Okt-2023	Sdr. Kasturi 1	KABUPATEN JEPARA	1. D ugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh Sdr. Kasturi di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. T idak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. T erdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
23	230678	12-Okt-2023	Sdr. Deni	KABUPATEN JEPARA	1. D ugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh Sdr. Deni di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. T idak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. T erdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
24	230677	12-Okt-2023	Sdri. Suprihatiningsih	KABUPATEN JEPARA	1. D ugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh Sdr. Suprihatiningsih di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. T idak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. T erdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
25	230675	12-Okt-2023	Sdr. Sugeng Prayogo 1	KABUPATEN JEPARA	1. D ugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh Sdr. Sugeng Prayogo 1 di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. T idak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. T erdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
26	230674	12-Okt-2023	Sdr. Sugeng Cahyono	KABUPATEN JEPARA	1. D ugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh Sdr. Sugeng di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. T idak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. T erdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
27	230673	12-Okt-2023	Sdr. Sutrisno	KABUPATEN JEPARA	1. D ugaan kegiatan tambak udang tanpa izin oleh Sdr. Sutrisno di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah; 2. T idak melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan; dan 3. T erdapat pipa inlet yang dipasang di dalam kawasan TNKJ.
28	230668	15-Okt-2023	PT Indonesia Power Bali Power Generation Unit Pesanggaran	KOTA DENPASAR	Pada tanggal 15 Oktober 2023 saat melewati Jalan Tol Bali Mandara, terlihat asap hitam yang diduga berasal dari cerobong PLTG PT Indonesia Power yaitu PLTG 5 dan PLTG 6 yang merupakan pembangkit baru untuk mendukung kegiatan G20 pada tahun 2022.

No	Nomor Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Nama Terlapor	Kabupaten/Kota	Uraian Pengaduan
29	230655	05-Sep-2023	Kopi Penggang dan Resort	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	Adanya satwa dilindungi yaitu Burung Elang
30	230653	12-Okt-2023	kegiatan usaha tambak udang	KABUPATEN JEPARA	kegiatan tambak udang tanpa izin lengkap, pipa inlet masuk ke wilayah TNKJ dan tidak mengolah air limbah yang dihasilkan
31	230633	26-Jun-2023	PT Wahana Citra Nabati	KOTA JAKARTA TIMUR	Dugaan PT Wahana Citra Nabati melakukan pembuangan air limbah langsung ke saluran air dan cerobong emisi tidak memenuhi ketentuan teknis
32	230632	12-Sep-2023	SPBU Tempurejo	KOTA KEDIRI	Dugaan pencemaran air berupa air sumur warga berbau akibat kebocoran tangki penyimpanan BBM SPBU Tempurejo
33	230628	19-Sep-2023	PT Seng Fong Moulding Perkasa	KABUPATEN JOMBANG	Dugaan kegiatan PT Seng Fong Moulding Perkasa mengakibatkan pencemaran udara berupa debu yang mengganggu pernafasan dan penglihatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan
34	230619	26-Jun-2023	PT Joenoes Ikamulya (YURI)	KOTA JAKARTA TIMUR	PT Joenoes Ikamulya diduga telah sengaja membuang limbah cair diduga limbah B3 langsung ke saluran air.
35	230618	26-Jun-2023	PT Johnson Home Hygiene Product	KOTA JAKARTA TIMUR	PT Johnson diduga dengan sengaja membuang limbah cair yang diduga limbah B3 langsung ke dalam saluran air
36	230550	29-Jul-2023	PT Angler Biochem Lab	KOTA SURABAYA	Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Nomor 600.4/25561/436.7.10/2023 tanggal 29 Juli 2023 perihal pelimpahan penanganan pengaduan lingkungan atas PT Angler Biochemlab Jl. Raya Sawo No.17-19 Surabaya dengan pokok aduan terdapat aduan warga Kecamatan Sambikerep terkait keluhan gagal panen tanaman padi di lahan pertanian karena air limbah dari PT Angler Biochem Lab.
37	230465	22-Agu-2023	Newstar konjac nusantara	KABUPATEN MADIUN	Membuang limbah B3 secara sembarangan (yang di komandoi lurah dan staff pabrik bernama paru), dan mengganggu istirahat warga pada saat malam hari
38	230277	22-Mei-2023	PT Jatim Autocomp Indonesia	KABUPATEN PASURUAN	Dugaan pembuangan air limbah oleh PT Jatim Autocomp Indonesia
39	230733	03-Okt-2023	PT Wonokoyo Jaya Corporindo	KABUPATEN PASURUAN	Dugaan pembuangan air limbah tidak memiliki izin dan melebihi baku mutu yang berdampak buruk pada lingkungan.
40	230732	03-Okt-2023	PT Marine Cipta Agung	KABUPATEN PASURUAN	Dugaan pembuangan air limbah tidak memiliki izin dan melebihi baku mutu yang berdampak buruk pada lingkungan.
41	230731	03-Okt-2023	PT Universal Jasa Kemas	KABUPATEN PASURUAN	Dugaan pembuangan air limbah tidak memiliki izin dan melebihi baku mutu yang berdampak buruk pada lingkungan.
42	230727	02-Okt-2023	PT Mitra Alam Segar	KABUPATEN PASURUAN	1. Diduga perusahaan tidak memiliki izin lingkungan 2. Diduga perusahaan tidak memiliki izin pembuangan air limbah ke media lingkungan 3. Diduga air limbah yang dibuang oleh perusahaan tidak memenuhi baku mutu yang berlaku
43	230717	02-Okt-2023	PT Delta Jaya Mas	KABUPATEN GRESIK	1. Dugaan tidak melakukan pengelolaan limbah b3 kemasan bekas sesuai aturan 2. Dugaan penimbunan limbah B3 dan Non B3 di area perusahaan 3. Dugaan pembuangan limbah sisa produksi di area belakang perusahaan
44	230710	18-Okt-2023	PT Peternakan Sawo Jaya	KABUPATEN MOJOKERTO	Dugaan pembuangan limbah kotoran ayam di lahan kosong di Desa Tanjanganrono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto yang menimbulkan bau menyengat dan volume sangat banyak oleh PT Peternakan Sawo Jaya
45	230660	02-Okt-2023	PT Fuboru Indonesia	KABUPATEN SIDOARJO	Dugaan PT Fuboru Indonesia pelanggaran manipulasi administrasi pelaporan pengangkutan dan pengolahan limbah B3 sisa Asbestos (A350-1) yang dihasilkan kepada KLHK dan dumping limbah B3.
46	230609	04-Sep-2023	Suraloka Zoo	KABUPATEN SLEMAN	Mini zoo diduga tidak berizin. Ditemukan satwa dilindungi antara lain burung kaka tua raja, burung kaka tua, burung betet
47	230605	23-Agu-2023	PT Lombok Energy Dynamics	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	Dugaan PT LED melakukan pembuangan air limbah ke laut tanpa dilengkapi SLO dan tidak melakukan pengelolaan Fly Ash dan Bottom Ash sesuai aturan yang berlaku.
48	230604	25-Sep-2023	PT Samudra Banten Jaya	KABUPATEN LEBAK	Terdapat limbah lumpur dari hasil penambangan PT SBJ yang merusak lahan sawah milik warga sebanyak 31 orang pemilik lahan di KP. Cimenteng. Adanya air bersih yang dirusak oleh PT SBJ yang berada pada titik koordinat 6°50'34.1"S 106°20'22.6"E (-6.842803, 106.339615).
49	230564	03-Agu-2023	PT Aneka Adhi Logam	KABUPATEN JOMBANG	Dugaan kegiatan pengangkutan limbah B3 tidak sesuai dengan perizinan dan peraturan perundangan.

No	Nomor Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Nama Terlapor	Kabupaten/Kota	Uraian Pengaduan
50	230504	21-Agu-2023	Perhutani KPH Jombang dan Divre Jawa Timur	KABUPATEN JOMBANG	Dugaan perusakan hutan lindung berupa penebangan pohon dan pembukaan jalan untuk tempat wisata.
51	230416	10-Jul-2023	PT Cogindo Daya Bersama (PLTD Nusa Penida)	KABUPATEN KLUNGKUNG	Diduga PLTD Nusa Penida menyerahkan limbah B3 berupa oli bekas kepada masyarakat yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3
52	230415	22-Jul-2023	PT Nata Putra Nusantara	KOTA TANGERANG	Diduga PT Nata Putra Nusantara, yang bergerak di bidang transporter limbah B3, melakukan penimbunan dan penjualan kembali limbah B3, yang seharusnya diserahkan kepada pihak ketiga pengelola limbah B3, di sebuah gudang di daerah Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang. Lokasi penimbunan dan penjualan kembali limbah B3 tersebut diduga tanpa izin.
53	230414	20-Jul-2023	PT Newstar Konjac Nusantara	KABUPATEN MADIUN	Perusahaan diduga melakukan pencemaran udara berupa debu, bau, dan kebisingan yang mengganggu masyarakat setempat, dan membuang air limbah pencucian porang tanpa dilakukan pengolahan dan diduga melebihi baku mutu
54	230406	18-Jul-2023	CV Adiraya Furniture	KABUPATEN NGANJUK	Sejak berdirinya perusahaan menyebabkan kebisingan yang mengganggu masyarakat sekitar, tidak ada tembok pembatas antara warga dan pabrik. Pada musim hujan menimbulkan bau dari serbuk gergaji. Musim panas menimbulkan debu. Menggunakan mesin yang tidak memiliki instalasi listrik sendiri sehingga berdampak pada tegangan listrik masyarakat yang tidak stabil.
55	230402	04-Jul-2023	PT Indo Sekawan Jaya	KABUPATEN LAMONGAN	Perusahaan telah menimbun residu oli bekas kurang lebih 150 ton selama kurang lebih 5 tahun tanpa memiliki izin. Pada tanggal 20 Juni 2023, pernah terjadi kebakaran di sekitar mesin.
56	230400	19-Mei-2023	PT Wijaya Sentosa Box	KABUPATEN SIDOARJO	Sering membuang air limbah berwarna warni ke media lingkungan ke Sungai selama kurang lebih 4 tahun
57	230384	12-Des-2022	PT Sengon Anugerah Nusantara	KABUPATEN PROBOLINGGO	a. Dugaan PT Sengon Anugerah Nusantara tidak memiliki dokumen terkait pengelolaan limbah B3; b. Dugaan PT Sengon Anugerah Nusantara tidak memiliki IPAL; c. Dugaan PT Sengon Anugerah Nusantara tidak mengerjakan laporan pelaksanaan UKL UPL sesuai dengan fakta di lapangan (uji kualitas air bersih, emisi, udara ambien, dan air limbah); d. Dugaan PT Sengon Anugerah Nusantara tidak menggunakan APD berupa sepatu dan masker pada saat jam kerja di perusahaan; e. Dugaan PT Sengon Anugerah Nusantara mengupah rendah para pekerja harian sebesar Rp 50.000; f. Dugaan PT Sengon Anugerah Nusantara tidak memiliki izin jembatan yang digunakan untuk akses jalan di sisi selatan dan utara; g. Dugaan PT Sengon Anugerah Nusantara menggunakan air minum isi ulang yang tidak diuji laboratorium untuk air minum karyawan; h. Dugaan PT Sengon Anugerah Nusantara belum memiliki IMB untuk gedung produksi sebelah utara.
58	230358	19-Mei-2023	PT Alu Aksara Pratama	KABUPATEN MOJOKERTO	Dugaan PT Alu Aksara Pratama melakukan penambahan luasan area dan berkegiatan tanpa izin untuk produksi yang belum terlingkup dalam izin, tidak memiliki IPLC namun telah membuang air limbah dan memiliki 8 sumur dengan 1 SIPA.
59	230353	07-Jul-2023	CV. Sumber Asia Trading Company	KABUPATEN PASURUAN	Dugaan pencemaran udara berupa bau tidak sedap di kawasan PIER akibat aktivitas CV. Sumber Asia Trading Company
60	230336	15-Mei-2023	CV Padma Sari Laundry	KOTA DENPASAR	Mulai diketahui tanggal 2 Mei 2023 CV Padma Sari Laundry melakukan usaha kegiatan laundry menggunakan boiler yang berbahan bakar oli bekas. CV Padma Sari Laundry melakukan pemanfaatan limbah B3 oli bekas tanpa izin dan menerima oli bekas dari pengangkut yang tidak memiliki izin.
61	230335	07-Jun-2023	PT Sorini Towa Berlian Corporindo	KABUPATEN PASURUAN	PT Sorini Towa Berlian Corporindo diduga membuang air berwarna hitam pekat menuju sungai Wwati.
62	230328	08-Mei-2023	PT Prima Parquet Indonesia Cabang Boyolali	KABUPATEN BOYOLALI	PT Prima Parquet Indonesia (PPI) cabang Boyolali, sampai saat ini belum mengantongi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) ataupun ijin lingkungan (UKL-UPL) dari instansi berwenang. Namun telah melakukan kegiatan produksi kayu yaitu berupa veneer dan plywood. Diduga pendirian pabrik itu menyalahi zonasi kawasan industri, dilokasi tersebut merupakan zona hijau sehingga tidak diperbolehkan untuk industri, yang dapat menimbulkan kebisingan dan polusi udara. Dalam proses produksi Plywood, industri tersebut juga menggunakan limbah B3 dan diduga tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berupa lem plywood unsur Fenol kategori limbah B3

No	Nomor Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Nama Terlapor	Kabupaten/Kota	Uraian Pengaduan
63	230307	28-Feb-2023	PT Cahaya Makmur Sejahtera (KM Mitra Konawe)	KABUPATEN GRESIK	Pada jam 2:50 dini hari 25 Februari 2023, Kapal kandas jenis cargo KM. Mitra Konawe dan diduga menabrak karang/merusak terumbu karang di pantaianjung Alang-alang, Desa Lebak, Pulau Bawean, Gresik titik koordinat: 5° 52' 20.971061" dan 112° 37' 19,3158".
64	230303	21-Feb-2023	PT Ficampindo Sentosa Jaya	KABUPATEN BOGOR	Dugaan terjadinya pencemaran air yang berasal dari air limbah PT Ficampindo Sentosa Jaya
65	230302	21-Feb-2023	PT Indonesia Bahari Lestari	KABUPATEN BOGOR	Dugaan pembuangan air limbah yang melebihi baku mutu ke sungai
66	230301	21-Feb-2023	PT Fresh On Time Seafood	KABUPATEN BOGOR	Dugaan pembuangan air limbah yang melebihi baku mutu ke sungai
67	230299	23-Des-2022	PT Eigerindo Multi Produk Industri	KABUPATEN BOGOR	Dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh PT Eigerindo Multi Produk Industri
68	230277	22-Mei-2023	PT Jatim Autocomp Indonesia	KABUPATEN PASURUAN	Dugaan pembuangan air limbah oleh PT Jatim Autocomp Indonesia
69	230276	12-Mei-2023	CV Abadi Wangun Jaya	KABUPATEN PURWAKARTA	Dugaan adanya penimbunan bahan kimia yang berbau menyengat dan mengganggu kesehatan
70	230243	20-Okt-2022	BBWS Remali Juana - PDAM Pemalang	KABUPATEN BANYUMAS	Pipanisasi perusakan hutan lindung wilayah Perhutani Banyumas Timur
71	230242	12-Okt-2022	PDAM Pemalang	KABUPATEN BANYUMAS	Hutan Lindung Gunung Slamet diduga rusak akibat proyek pembangunan jaringan pipa air bersih sepanjang 20 kilometer dari Pulosari, Pemalang, melewati hutan Gunung Slamet di Kabupaten Purbalingga dan Banyumas. Pada 23 September 2022, Sungai Banjaran di wilayah lokasi Wisata Curug Bayan Desa Ketenger Kecamatan Baturraden meluap dan menunjukkan gejala tidak wajar dibandingkan pada saat musim hujan ditahun-tahun sebelumnya dan tingkat kekeruhan juga menunjukkan adanya larutan erosi tanah yang cukup masif (coklat tua).
72	230226	09-Jan-2023	PT Brik Epet Sinergi Tambang	KABUPATEN BOGOR	Diduga ada kegiatan penambangan galian ilegal jenis C (tanah) yang tidak memiliki dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, izin kegiatan tambang, dan tidak memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam bidang konservasi dan pertambangan/galian.
73	230224	24-Mar-2023	PT GS Battery	KABUPATEN KARAWANG	Dugaan PT GS Battery melakukan peleburan aki bekas tanpa izin, adanya asap tebal dan berbau menyengat, dugaan pencemaran lingkungan dari kegiatan pembuangan air limbah ke Sungai
74	230215	10-Feb-2023	PT Sambenara Bandar Bali	KOTA DENPASAR	Diketahui tanggal 20 Februari 2023 bahwa PT Sambenara Bandar Bali melakukan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 oli bekas tanpa izin, dan menerima oli bekas dari pengangkut yang tidak memiliki izin.
75	230213	27-Mar-2023	Syamsul Arifin (Koperasi Belerang Raksa)	KABUPATEN PASURUAN	Dugaan perusakan kawasan hutan dengan pembukaan kawasan dan penambahan jalan baru untuk pengambilan belerang oleh Koperasi Belerang Raksa
76	230194	07-Apr-2023	PT Putra Restu Ibu Abadi	KABUPATEN MOJOKERTO	- Pada Jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB limbah cair berwarna putih pekat meluber ke area persawahan milik warga yang berlokasi di Dusun Gondang Desa Parengan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Saksi mata Ibu Sujiati menuturkan bahwa limbah cair berwarna putih pekat tersebut diduga dibuang/dialirkan oleh PT PRIA ke lahan persawahan milik warga di 2 desa yang berlokasi di Kecamatan Jetis pukul 15.00 sampai malam hari. PT PRIA diduga membuang limbah cair berwarna putih pekat dengan volume besar. Pada hari Jum'at pukul 19.30 WIB, ibu Sujiati membawa sampel air limbah tersebut ke laboratorium ECOTON. Hasil pengujian air limbah oleh Laboratorium ECOTON diperoleh hasil bahwa hasil logam berat (Mn) yaitu 200 ppm, dan LoTDS yaitu 3790 mg/L. hal ini jauh melebihi baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah.

No	Nomor Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Nama Terlapor	Kabupaten/Kota	Uraian Pengaduan
77	230193	07-Apr-2023	PT Putra Restu Ibu Abadi (PT PRIA)	KABUPATEN MOJOKERTO	- Pada Jum'at tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB limbah cair berwarna putih pekat meluber ke area persawahan milik warga yang berlokasi di Dusun Gondang Desa Paringan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Saksi mata Ibu Sujati menuturkan bahwa limbah cair berwarna putih pekat tersebut diduga dibuang/dialirkan oleh PT PRIA ke lahan persawahan milik warga di 2 desa yang berlokasi di Kecamatan Jetis pukul 15.00 sampai malam hari. PT PRIA diduga membuang limbah cair berwarna putih pekat dengan volume besar. Pada hari Jum'at pukul 19.30 WIB, ibu Sujati membawa sampel air limbah tersebut ke laboratorium ECOTON. Hasil pengujian air limbah oleh Laboratorium ECOTON diperoleh hasil bahwa hasil logam berat (Mn) yaitu 200 ppm, dan LoTDS yaitu 3790 mg/L. hal ini jauh melebihi baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah.
78	230186	07-Apr-2023	PT Putra Restu Ibu Abadi	KABUPATEN MOJOKERTO	Diduga PT Putra Restu Ibu Abadi melakukan pembuangan limbah berwarna putih dan meluber hingga ke saluran irigasi dan persawahan warga di Desa Lakardowo dan Desa Paringan
79	230159	16-Mar-2023	Usaha a.n Sdr. Ipunk	KABUPATEN MOJOKERTO	Dugaan adanya kegiatan home industry pengecatan helm di Kabupaten Mojokerto yang menyebabkan bau menyengat dan sesak nafas oleh Sdr. Ipunk di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.
80	230134	31-Okt-2022	PT Anugerah Cakra Buana Jaya Lestari	KABUPATEN SITUBONDO	Warga sangat resah terhadap pencemaran udara seperti debu dan bau menyengat dampak dari kegiatan produksi AMP pabrik penggilingan baru dan aspal dari PT Anugerah Cakra Buana Jaya Lestari.
81	230133	22-Feb-2023	CV Tri Putra Jaya	KABUPATEN BADUNG	CV Tri Putra Jaya telah lama melakukan usaha laundry menggunakan boiler sebagai energi pemanas yang berbahan bakar oli bekas tanpa dilengkapi dengan perizinan. Oli bekas tersebut didapatkan dari pengumpul [erorangan maupun perusahaan pengangkut limbah B3 ilegal yang tidak memiliki izin pengangkutan dari instansi berwenang.
82	230119	23-Des-2022	CV Duta Pasir Semeru	KABUPATEN LUMAJANG	Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang CV Duta Pasir Semeru dengan melakukan pembangunan bendungan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan aliran lahar erupsi Gunung Semeru tidak mengalir ke sungai melainkan ke permukiman penduduk.
83	230118	09-Okt-2022	PT Long Rich Indonesia	KABUPATEN CIREBON	Dugaan PT Long Rich Indonesia tidak melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan
84	230116	18-Nov-2022	usaha tahu a.n Andi Purwanto	KABUPATEN JOMBANG	1. Dugaan kegiatan industri tahu Sdr. Andi Purwanto menyebabkan pencemaran udara dari penggunaan bahan bakar plastik yang menimbulkan asap cerobong berwarna hitam. 2. Dugaan kegiatan industri tahu Sdr. Andi Purwanto tidak melakukan pengolahan air limbah
85	230505	01-Agu-2023	PT Madu Lingga Raharja	KABUPATEN GRESIK	Dugaan pengelolaan limbah non B3 tidak sesuai dengan perizinan dan peraturan perundang-undangan oleh PT Madu Lingga Raharja, Kabupaten Gresik;
86	220758	01-Des-2022	PT Batavia Alumindo Industri	KABUPATEN TANGERANG	2. Dugaan terhadap kegiatan PT Batavia Alumindo Industri oleh Masyarakat disebabkan terganggunya warga sekitar dengan polusi udara atau asap pekat yang ditimbulkan akibat kegiatan produksi
87	220693	01-Okt-2022	PT Satoria Agro Industri	KABUPATEN PASURUAN	Diduga perusahaan melakukan pembuangan air limbah tanpa dilengkapi izin dan melebihi baku mutu yang berlaku, serta tidak melakukan pengolahan air limbah dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
88	220692	01-Okt-2022	PT Sorini Agro Asia Corporindo	KABUPATEN PASURUAN	Diduga perusahaan melakukan pembuangan air limbah tanpa dilengkapi izin dan melebihi baku mutu yang berlaku, serta tidak melakukan pengolahan air limbah dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

No	Nomor Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Nama Terlapor	Kabupaten/Kota	Uraian Pengaduan
89	220639	25-Okt-2022	PT. DELAPAN SATU DELAPAN BUTTERFLIES	KOTA JAKARTA SELATAN	MELAKUKAN PERDAGANGAN (EKSPOR) ILEGAL atau PENYELUNDUPAN KUPU KUPU SAYAP BURUNG, YANG DILINDUNGI SECARA UNDANG UNDANG TANPA MEMILIKI STAS-LN dan CITES PERMIT
90	220618	18-Okt-2022	PT Sky Iragindo	KABUPATEN BOGOR	Pencemaran udara di sekitar rumah warga dan sekitarnya. Pembakaran kayu untuk di jadikan areng briket untuk xpor,kami warga rt03 keberatan adanya pabrik areng,karena izin lingkungan hanya untuk gudang dan Peking,dan salahnya di berikan izin lingkungan,padahal ini bukan wilayah industri,saya sudah mengadukan prihal ini sampai RT dan RW desa dan pol PP kecamatan gunung Sindur tapi masih, beroperasi saya ingin menuntut keadilan yang sebenarnya dan saya harap pabrik ini di adakan audit dadakan jangan sampai pihak kec dan desa tau kalau ada audit lingkungan terimakasih. surat ini saya sudah sampaikan juga ke Instagram bapak presiden Jokowi Dodo.
91	220211	21-Apr-2022	PT. Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	KOTA JAKARTA UTARA	Selamat siang, Nama saya Febrian. Saya ingin sampaikan pengaduan terkait KLH. Bahwa PT. Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (PT. Jppi) selaku penghasil limbah B3, melakukan penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 di dalam workshop tanpa dilengkapi TPS LB3 dan perizinan. Hal ini masih berlangsung untuk setiap area operasional PT. JPPI. Lokasi operasional perusahaan berada di dalam area Pelabuhan, yaitu di Tanjung priok, Banten, Cirebon, Pontianak, Pangkal balam, Panjang, Bengkulu, Palembang, Jambi, Teluk bayur.
92	220210	21-Apr-2022	PT. Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	KOTA JAKARTA UTARA	Selamat siang, Nama saya Febrian. Saya ingin sampaikan pengaduan terkait KLH. Bahwa PT. Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (PT. Jppi) sebagai penghasil limbah B3 dari hasil kegiatan jasa nya, melakukan penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 di dalam workshop tanpa dilengkapi TPS LB3 dan perizinan, dan kegiatan ini terus berlangsung. Lokasi workshop operasional perusahaan berada di dalam area Pelabuhan, yaitu di Tanjung priok, Banten, Cirebon, Pontianak, Pangkal balam, Panjang, Bengkulu, Palembang, Jambi, Teluk bayur.
93	220428	03-Agu-2022	David Reward S. (PT. Deimtrida Arira Jaya Chemical industry)	KOTA TANGERANG	Polusi udara bau kimia disaat malam hari dan disaat hujan
94	220409	28-Jul-2022	PT. Deimtrida arira jaya	KOTA TANGERANG	Setiap malam hampir selalu mengeluarkan bau kimia seperti nya ada kegiatan pabrok pembuatan bahan kimia yang mencemari udara sekitar nya rumah warga

G. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan terealisasi sebanyak 15 operasi dari target sebanyak 6 operasi atau 250%, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 9. Daftar Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Tahun 2022

No.	Kategori Permasalahan*	Tanggal Kegiatan	Provinsi	Kabupaten / Kota	Detail Lokasi	Fungsi Kawasan	Identitas Pelaku	Hasil Operasi	Detail Tangkapan	
									Volume Kayu (m3)	Luas Area yang Diamankan (Ha)
1	Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di dalam wilayah kerja SPTN Wilayah I Lebak, BTN Gunung Halimun Salak	20-22 Maret 2023	Banten	Lebak	STPN Wilayah I Lebak, BTN Gunung Halimun Salak	Kawasan Konservasi (Taman Nasional)	-	Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Blok Cimari dan Blok Cirotan, Resort Panggarangan, SPTN Wilayah I Lebak, TN Gunung Halimun Salak dilakukan secara persuasif Hasil penertiban ditemukan 6 lubang bekas PETI dan telah dilakukan penutupan Telah dilakukan pembongkaran gubuk penambang dan pengamanan karung dan alat kegiatan PETI pemasangan spanduk larangan kegiatan penambangan ilegal di	-	4476,6

No.	Kategori Permasalahan*	Tanggal Kegiatan	Provinsi	Kabupaten / Kota	Detail Lokasi	Fungsi Kawasan	Identitas Pelaku	Hasil Operasi	Detail Tangkapan	
									Volume Kayu (m3)	Luas Area yang Diamankan (Ha)
2	Aktivitas Penambangan Batu dan Pasir di dalam wilayah kerja SPTN Wilayah II Bogor, BTN Gunung Halimun Salak	28 - 30 Maret 2023	Jawa Barat	Bogor	STPN Wilayah I Lebak, BTN Gunung Halimun Salak	Kawasan Konservasi (Taman Nasional)	Endang Alias Bedong, Akah, Acam, Nanang	<p>a. Menyampaikan surat peringatan ke-2 kepada para penampung atau Bos Galian Pasir Illegal.</p> <p>b. Melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada para pelaku yang sedang beraktivitas dan meminta agar membubarkan diri dan tidak kembali lagi beraktivitas di lokasi.</p> <p>c. Melakukan pembongkaran saung atau tempat beristirahat para pelaku sejumlah 9 bangunan.</p> <p>d. Melakukan pemasangan spanduk larangan aktivitas di dalam kawasan hutan pada 2 lokasi berbeda.</p> <p>e. Mengamankan Barang Bukti alat-alat penambangan pasir yaitu pengki, cangkul, ayakan, sekop, pahat, cungkil, palu godam, sarung tangan, dongkrak, linggis, alat kunci pas dan terpal.</p> <p>f. Menyampaikan surat tembusan kepada Muspika (Polsek, Koramil, Kecamatan) Tamansari, Desa Tamansari dan Desa Sukamantri.</p> <p>g. Melaksanakan pertemuan dan diskusi bersama perwakilan Desa Tamansari dan Desa Sukamantri terkait aktivitas penambang pasir yang telah meresahkan warga karena berdampak pada lingkungan dan rusaknya akses jalan akibat truk pasir yang lalu lalang.</p>	5491	

No.	Kategori Permasalahan*	Tanggal Kegiatan	Provinsi	Kabupaten / Kota	Detail Lokasi	Fungsi Kawasan	Identitas Pelaku	Hasil Operasi	Detail Tangkapan	
									Volume Kayu (m3)	Luas Area yang Diamankan (Ha)
3	Adanya kegiatan illegal logging di kawasan hutan Taman Nasional Tambora	29/3-2/4/2023	NTB	Dompu	TN Gunung Tambora	Konsevasi Taman Nasional	Tidak ditemukan pelaku illegal logging	Menemukan 7 batang balok kayu jenis Sonokeling (Dalbergia Latipolia) dengan ukuran rata rata (10x10x200) cm dan pada koordinat S 8°26'18" E 117°57'8" dan menemukan Papan kayu jenis Sonokeling dengan ukuran rata-rata (2x25x180) Cm sebanyak 23 lembar. Kayu selanjutnya diamankan di kantor Cantaury Rusa, Taman Nasional Tambora		13.900 ha
4	Membatasi kerusakan hutan dan lingkungan serta penertiban dan Penghalauan Pendakian Illegal	17 s/d 21 Mei 2023	Jawa Barat	Cianjur	Cibodas dan Gunung Putri	Taman Nasional	Ade Sopandi bin H.Sadil, Tempat Tanggal Lahir, Cianjur .17 Juni 1973, Pekerjaan: Petani, Alamat : Gunung Putri Rt04/Rw08 Desa Sukatani Kec, Pacet, Kabupaten Cianjur	Berhasil mencegah 2 Orang Pendaki Illegal, 1. Nama: Jeni Zaelani, Alamat Babakan Bandung, Sukabumi, Perantara (Broker) BC Adnan, 2. Fakhriy Sami Falah Suwandi, Alamat, Subang Jaya, Sukabumi. Para pendaki di giring turun keluar dari Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.		sda (lokasi sama)

No.	Kategori Permasalahan*	Tanggal Kegiatan	Detail Lokasi	Fungsi Kawasan	Identitas Pelaku	Hasil Operasi	Detail Tangkapan	
							Volume Kayu (m3)	Luas Area yang Diamankan (Ha)
5	Kegiatan pendakian tanpa izin dalam kawasan hutan	31 Mei s/d 4 Juni 2023	Resort Cibodas dan Resort Gunung Putri, Seksi PTN I Cibodas, Bidang PTN Wilayah I Cianjur, TN Gunung Gede	Konservasi		1. Operasi pengamanan kawasan hutan dalam rangka penertiban kegiatan pendakian tanpa izin telah dilakukan di jalur pendakian Cibodas dan Gunung Putri, TN Gunung Gede Pangrango	-	1.450 Ha
6	Pendakian Illegal	14-20 Agustus 2023	SPTN Wilayah I Cibodas, Bidang PTN Wilayah I Cianjur	Taman Nasional	Iwan Mawardi	Pengamanan Kawasan dan mengamankan 1(satu) orang pendaki atas nama Iwan Mawardi serta melakukan upacara peringatan hari kemerdekaan RI yang ke 78 di Alun alun Suryakencana		24.270 Ha
7	Pengamanan Kawasan	8-9 agustus	TN Baluran	Hutan Konservasi		terduga berjumlah 1 orang dengan barang bukti berupa 2 buah kapak, 1 buah sabit, tali dan karung		1500 Ha
8	Pengamanan Kawasan	11-14 Oktober 2023	Sumber Waru, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo	Taman Nasional		menggagalkan pencurian kayu jati sebanyak 10 (sepuluh) gelondong yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) buah kendaraan roda empat yakni 1 (satu) buah kendaraan minibus Daihatsu Grandmax warna hijau pupus tanpa plat nomor dan 1 (satu) buah kendaraan pick up Suzuki Mega Carry warna hitam dengan plat nomor M 8439 GC		1500 Ha
9	Pengamanan Kawasan	13-16 Oktober	Getas	KHDTK Ngawi		Sosialisasi pengamanan KHDTK UGM		114 Ha

No.	Kategori Permasalahan*	Tanggal Kegiatan	Detail Lokasi	Fungsi Kawasan	Identitas Pelaku	Hasil Operasi	Detail Tangkapan	
							Volume Kayu (m3)	Luas Area yang Diamankan (Ha)
10	Pengamanan Kawasan	17 – 22 OKTOBER 2023	TNKJ	TNKJ	Suprihatiningsih, Turnadi, Deni, Kasturi, M. Ishadul Haque, Mirah, Subroto, Teguh Santoso, Sutrisno, Sugeng, Sugeng Prayoga, Turnadi, Faisol, Ali Muarif, Endang, Suroto, Deni, dan Umar	Tindakan penghentian kegiatan tambak udang berupa pemasangan plang di TKP sebanyak 10 unit dan Pemotongan Pipa Inlet Tambak Udang (kolam udang tidak terisi) Kawasan TN Karimun Jawa sebanyak 7 unit :		
11	Perambahan dalam kawasan hutan ± 10 ha	22-28 November 2023	Kawasan Hutan Lindung Mutis Timau pada koordinat S 9° 27' 3,086" dan E 124°7' 15.884"	Fungsi Kawasan Hutan Lindung	Yakobus Bene, Daud Laome, Metos Tahaob, Sebastianus Leitakaeb, Daud Nofu, Simos Nenoliu, Oktovianus Nino, Bartolomeus Manuel, Jonisius Bani, Pelipus Manuel, Kornelis Tob dan Karel Laome,	Diamankan 9 (Sembilan) buah parang dan 1 (satu) unit mesin Chain Saw yang digunakan untuk membuka lahan pertanian	± 10 ha	38.800 Ha
12	Pengamanan Kawasan	5-8 November	Karimun Jawa	TNKJ		Operasi lanjutan		
13	Pengamanan Kawasan	8-10 november 2023	Getas	KHDTK Ngawi		Operasi lanjutan		114
14	Pengamanan Kawasan	19-24 Nov 2023	Taman Nasional Baluran	Kawasan Konservasi (Taman Nasional Baluran)	Edi Hariyanto (melarikan diri), Heli Koptiono (melarikan diri), Bagong (penadah), Edi Berekei (penadah), Sumarjan (penadah), Mistar bin Sahadin (penadah), fathor rozy (ilog), Robert Dian Gazali (ilog), Wahedi Bin Suliman (ilog)	gelondong kayu jati, 1 unit mobil Daihatsu Sigra beserta STNK (N 1783 BF), 1 Unit motor Honda Beat (tanpa nopol), 1 Unit pickup Suzuki Mega Carry (tanpa nopol), 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Jenis N Max warna hitam (tanpa nomor polisi) dan 1 (satu), buah Handphone Merk Samsung A13.		1500
15	Pengamanan Tersangka Amin bin Daeng	8-10 Juni 2023		Depo SPIL Surabaya	Amin bin Daeng	tim operasi dibagi menjadi 2, tim pertama melakukan penitipan tahanan di Polda Jatim bersama PPNS. Tim kedua melakukan penjagaan barang bukti di Depo SPIL Indonesia		

H. Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal terealisasi sebanyak 15 Operasi (250%) dari target sebanyak 6 Operasi atau 200%.

Tabel 10. Daftar Operasi Peredaran Hasil Hutan (TSL) Tahun 2023

No	Deskripsi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan		Detail Hasil Operasi (Barang Bukti)				
			Kabupaten/ Kota	Koordinat		Jenis (mis: Burung, Harimau, Pohon, Bibit, dll.)	Bagian (mis: Kulit, Tulang, Sisik, Bunga, dll.)	Jumlah	Identitas Pelaku
				X	Y				
1	Operasi dilakukan terhadap pemilik bagian-bagian satwa berupa kulit macan tutul yang berdasarkan pengembangan dari keterangan tersangka An.M.Rijal sebagai penjual bagian-bagian satwa.	20-23 Pebruari 2023	Bogor	6°31'15"	106°48'35"	Macan Tutul	Kulit	1 ekor	Ramdhani
2	Operasi berdasarkan laporan dari LSM Scorpio via PPH dan Polda Metro Jaya Unit Sundaling terkait adanya penjualan Satwa liar di sekitar kota Depok Provinsi Jawa Barat	2 - 4 Maret 2023	Depok	6°6'6"	106°44'21"	Burung Nuri Kepala Hitam 2 ekor, Kancil 5 ekor, Binturong 1 ekor, Kucing hutan 2 ekor, Siamang 2 ekor		12 ekor	Sugeng
3	Operasi Peredaran Satwa Illegal di Terminal Internasional Bandara Juanda	07-10 April 2023	Sidoarjo	112,795054	-7,373	Labi - Labi Moncong Babi (<i>Carettochelys insculpta</i>)		5632 ekor	David Setiawan
4	Operasi peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar	06-13 Mei 2023	Manggarai Barat	S 08°29'.10.94"	E. 119°32'.09	Komodo	individu	1 ekor	Habibur Rahman, Waslim
5	Operasi penangkapan TSL	10-13 Agustus 2023	Surabaya			Nuri Talaud Perkici Dora Julang Sulawesi		9 ekor 8 ekor 2 ekor	Mochamad Faisal Ibrahim
6	Operasi penangkapan TSL	9-23 Agustus 2023	Depok (Seksi KSDA Wilayah I Bogor Bidang KSDA Bogor BBKSDA Jabar)	6° 24' 27,02"	106° 53' 1,496"	Mengamankan : 1 (satu) ekor Kakatua Raja (<i>Probosciger aterimus</i>) dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor Kakatua Maluku (<i>Cacatua moluccensis</i>) dalam keadaan hidup dan 2 (dua) ekor Kuskus Siku Putih (<i>Phalanger vestitus</i>) dalam keadaan hidup		4 ekor	Maristria Mahir Prakoso

No	Deskripsi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan			Detail Hasil Operasi (Barang Bukti)			
			Kabupaten/ Kota	Koordinat		Jenis (mis: Burung, Harimau, Pohon, Bibit, dll.)	Bagian (mis: Kulit, Tulang, Sisik, Bunga, dll.)	Jumlah	Identitas Pelaku
				X	Y				
7	Operasi Peredaran TSL di Wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang	29-31 Agustus 2023	Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Tangerang	06°09'07,8"	106°44'14,5"	Ofsetan		RIDWAN ARIFIN ALIMIN	
						Macan Tutul (Ukuran):			
						Besar (Lebih dari 1 m ²)	3 lembar	TTL: Jakarta, 6/1/1988	
						Sedang (0,1-1)m ²	1 lembar	Alamat : Jalan Rawa Buaya rt 3, rw 2, kelurahan: Rawa Buaya, Kecamatan: Cengkareng, Ksb/Kots: Jsksrts Barat	
						-Kecil (0-0,1)m ²	85 lembar		
						Olahan = Dompot	10 buah		
						Ofsetan Harimau, Ukuran);		11740	
						- Besar (Lebih dari 1 m ²)	1 lembar	Status:Kawin	
						- Sedang (0,1-1)m ²	27 lembar		
						-Kecil (0-0,1)m ²	183 lembar		
						Olahan =			
						-Dompot	6 buah		
						-Ikat pinggang	3 buah		
						-Peci	5 buah		
						Ofsetan Beruang :			
						- Kulit	17 lembar		
						-Kepala	2 buah		
tengkorak macaca	3 buah								
duri landak	94 buah								
kulit macan basah	1 ember								
resi pengiriman	97 buah								

No	Deskripsi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan			Detail Hasil Operasi (Barang Bukti)				
			Kabupaten/ Kota	Koordinat		Jenis (mis: Burung, Harimau, Pohon, Bibit, dll.)	Bagian (mis: Kulit, Tulang, Sisik, Bunga, dll.)	Jumlah	Identitas Pelaku	
				X	Y					
8	Operasi penangkapan TSL	20-24 September 2023	Desa Kopeng, Kec. Getasan, Semarang	S= 7°23'47,9"	E = 110°25'14,6"	Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus leucogaster),		1 ekor	Gading Putra lawayunda	
						Elang Paria (Milvus migrans),		2 ekor		
							Elang Paria mati atau ofsetan (Milvus migrans),			1 offsetan
						Nuri Bayan (Ecluctus roratus),		1 ekor		
						Kakatua Koki (Cacatua galerita),		1 ekor		
						sarung tangan kulit,		3 buah		
						7.2 (dua) buah kandang/kurungan besi		2 buah		
Handphone merk Apple 11 warna hitam dengan Nomor SIMCARD 085641046462		1 unit								
9	Operasi penangkapan TSL	10-14 Oktober 2023	Dusun Karangkepoh RT/RW 001/004, Kel./Desa Banaran, Kec. Boyolali			Trenggiling		5 ekor	ALI ABDUL ROHMAN bin SU TRISNO	
						Sisik Trenggiling		8,5 kg		
						Box kontainer plastic		1 buah		
						Papan kayu		1 box		
						Handphone Merk Oppo warna biru		1 buah		
10	tim Cyber Balai Gakkum Jabalnusra menemukan sebuah postingan yang menawarkan barang berupa Offsetan Harimau Sumatera, oleh seseorang atau akun Facebook media sosial Facebook di dalam grup "Gudang Taring" memosting iklan jual beli offsetan harimau sumatera. Diketahui yang melakukan atau yang memosting offsetan harimau sumatera tersebut adalah oknum anggota TNI aktif, yang beralamat di kota Blitar	6-8 Oktober 2023	Blitar, Jl. Lb. Timur Asri A, RT.1/RW.1, Barek, Plumbangan, Kec. Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 6618			Harimau sumatera	Offset	1	Sdr. Koptu Iswanto	

Tabel 11. Daftar Operasi Peredaran Hasil Hutan (Illegal Logging) Tahun 2023

No.	Kategori Permasalahan*	Tanggal Kegiatan	Provinsi	Kabupaten / Kota	Detail Lokasi	Fungsi Kawasan	Identitas Pelaku	Hasil Operasi	Detail Tangkapan	
									Volume Kayu (m3)	Luas Area yang Diamankan (Ha)
1	Illegal Logging	18-21 Januari 2023	Jawa Timur	Surabaya	Area Pergudangan Mutiara Margomulyo Indah Blok A No.7, Jalan Tambak Langon, Asemrowo, Surabaya		Supriyono	Kayu olahan jenis merbau yang diduga illegal tersebut sebanyak 115,1938 M3 setara dengan 5.108 pcs	5.108	
2	Illegal Logging	21-24 Maret 2023	Jawa Timur	Situbondo	Jalan Raya Banyu putih desa Sumber Rejo Kec. Banyu Putih Kab. Situbondo	Kawasan Konservasi (Taman Nasional Baluran)	Budiono, Abd. Karim	1 Unit pickup Daihatsu Grand Max dan 37 batang kayu jati	37 btg (1,8149 M3)	
3	Illegal Logging	29 Maret s.d 2 April 2023	NTB	Dompu	Taman Nasional Gunung Tambora	Konservasi		Menemukan beberapa tonggak kayu dan batang jenis sonokeling dan melakukan pemusnahan barang bukti kayu jenis sonokeling dengan menggunakan chainsaw.		13.900ha
	Illegal Logging							Menemukan 7 batang balok jenis sonokeling dan 23 lembar. Selanjutnya Barang Bukti tersebut diamankan di kantor	0,24 M3	

No.	Kategori Permasalahan*	Tanggal Kegiatan	Provinsi	Kabupaten / Kota	Detail Lokasi	Fungsi Kawasan	Identitas Pelaku	Hasil Operasi	Detail Tangkapan	
									Volume Kayu (m3)	Luas Area yang Diamankan (Ha)
4	Illegal Logging	18-22 Juni 2023	Jawa Timur	Situbondo	Areal Perhutani	Hutan Produksi	Abdul Jalil, Yanto, dan Hadi Cahyono Saputro	Kayu Sonokeling dalam bentuk olahan	335 Batang (9,9640 M3)	
5	Illegal Logging	08-10 Juni 2023	Jawa Timur	Surabaya	Pelabuhan Tanjung Perak	Luar Kawasan	Amir Bin Daeng Tata	Kayu Gergajian jenis Merbau	57 Kontainer	

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya.

Secara rinci perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya (T-1/Tahun 2022) di samping terdapat beberapa kenaikan capaian kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, juga terdapat penurunan kinerja sebagaimana tabel 12 dibawah ini.

Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2023 dengan Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN IKK	
			2022	2023
1.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pene-gakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
2.	Terlaksananya Pencegahan dan Pengaman Hutan terhadap gang-guan dan anc-aman hutan di 34 Provinsi	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	7 Operasi	15 Operasi
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal.	9 Operasi	15 Operasi
		Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	119 Orang	22 Orang
3.	Meningkatnya efektivitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkung-an dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	101 izin	212 izin
		PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	27 Orang	25 Orang

4.	Meningkatnya efektivitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21	27 Kasus	33 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan	10 Orang	14 Orang
5.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup		2 Kasus

3.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dari tabel 12 tersebut di atas dapat dilihat adanya besaran peningkatan kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 2023 dibandingkan kinerja tahun 2022, dan juga penurunan kinerja pada beberapa IKK dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara pada tahun 2023 sebesar Rp. 56.821.723.000,- lebih besar dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya (2022) sebesar Rp. 41.185.745.000,-. Namun, pagu anggaran tahun 2023 tersebut bukan tercatat dari awal tahun anggaran, terjadi penambahan anggaran di tengah tahun. Sehingga perencanaan kurang maksimal. Anggaran awal tahun 2023 adalah sebesar Rp. 45.876.723.000,-. Penambahan anggaran sebesar Rp. 10.945.000.000,- terjadi pada bulan Juli 2023 dan bersumber dari dana PNBK.
2. Adanya kegiatan Pembangunan Pusat Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu untuk proses pengadaan barang/jasa, juga turut mempengaruhi kinerja Balai secara keseluruhan.

3.1.4 Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Pengukuran tingkat efektivitas pencapaian kinerja tahun 2023 dilakukan melalui perbandingan antara pencapaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui kemajuan efektivitas pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2023. Kriteria yang dijadikan pedoman efektivitas pencapaian kinerja, yaitu :

- 1) Rasio perbandingan > 1 , artinya terjadi peningkatan efektivitas pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun sebelumnya;
- 2) Rasio perbandingan $= 1$, artinya peningkatan efektivitas pencapaian kinerja tahun 2023, tetap/sama dengan tahun sebelumnya dan sama dengan kinerja tahun 2022.
- 3) Rasio perbandingan < 1 , menunjukkan efektivitas pencapaian kinerja menurun, artinya efektivitas kinerja 2023 lebih rendah dibandingkan efektivitas kinerja 2022.

Pengukuran efisiensi pencapaian kinerja tahun 2023 dilakukan melalui perbandingan antara pencapaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran tahun 2023. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat diketahui tingkat efisiensi pencapaian kinerja yang dilaksanakan tahun 2023. Kriteria yang dijadikan pedoman efisiensi pencapaian kinerja, yaitu:

- 1) Rasio perbandingan > 1 atau $= 1$, artinya dalam pencapaian kinerja tahun 2023 berjalan secara efisien.
- 2) Rasio perbandingan < 1 , menunjukkan efisiensi pencapaian kinerja kurang efisien artinya dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 anggaran yang diserap belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja tahun 2023.

Tabel Capaian efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya Tahun 2023 digambarkan dalam tabel 13 dibawah ini :

Tabel 13. Capaian Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

No	Indikator Kegiatan	Capaian				Efektifit	Efisiensi	Capaian Kegiatan
		Capaian OP		DIPA 2023				
		2022	2023	Realisasi	Capaian	D/C	D/F	
1	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	175,00%	250,00%	2.978.788.242	100,00%	1,43	1,33	8 Operasi
2	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	150,00%	250,00%	2.464.768.569	100,00%	1,67	2,17	12 Operasi
3	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	297,50%	146,67%	199.998.315	100,00%	0,49	1,47	22 Orang
4	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	103,06%	133,33%	3.618.133.670	100,00%	1,29	1,33	212 Perusahaan
5	Peningkatan Kapasitas PPLH	540,00%	250,00%	49.999.817	100,00%	0,46	2,50	25 Orang
6	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		100,00%	1.773.060.143	99,95%	-	1,00	2 Kasus
7	Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	112,50%	103,13%	10.832.682.537	99,74%	0,92	1,03	33 Kasus
8	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	250%	280%	6.027.668	99,99%	1,12	2,80	14 Orang
9	Layanan Perkantoran	100%	100%	28.611.476.962	100,00%	1,00	1,00	1 Layanan
10	Layanan Umum	100%	100%	3.718.270.661	99,98%	1,00	1,00	1 Layanan
11	Layanan Sarana Internal	100%	100%	2.537.409.292	100,00%	1,00	1,00	1 Layanan

Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara dibandingkan Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022 untuk masing-masing IKK dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 1,43 atau > 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023 lebih bagus dari tahun 2022, hal ini disebabkan anggaran untuk kegiatan Operasi Pengamanan Kawasan Hutan pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.978.810.000,- lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 1.841.212.000,-.
- Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 1,44 atau > 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023 lebih bagus dari tahun 2022, hal ini disebabkan anggaran untuk kegiatan Peredaran Hasil Hutan pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.464.808.000,- lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 1.336.610.000,-. Kegiatan operasi peredaran hasil hutan, khususnya operasi peredaran TSL memang cukup dominan di wilayah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, karena menjadi lokasi tujuan perdagangan dari berbagai daerah di Indonesia.
- Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 0,49 atau < 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022, hal ini disebabkan kegiatan latihan menembak, yang pada tahun 2022 anggarannya dimasukkan dalam komponen peningkatan kapasitas, pada tahun 2023, anggarannya dimasukkan dalam komponen operasi, sehingga tidak direncanakan dan dicatat dalam komponen peningkatan kapasitas polisi kehutanan;
- Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 1,29 atau > 1 ; yang

berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022, hal ini disebabkan anggaran untuk Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.618.200.000,- lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 1.867.255.000,-. Demikian pula target yang diberikan Direktorat PPSA kepada BPPHLHK Jablnusra tahun 2023 sebanyak 159 lembaga/perusahaan, lebih besar dari target tahun 2022 sebanyak 98 perusahaan. Sehingga dengan besarnya output yang diberikan memacu untuk lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan verifikasi lapangan;

- Peningkatan Kapasitas PPLH. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 0,46 atau < 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022, hal ini dikarenakan pelaksanaan peningkatan kapasitas PPLH yang dicatat hanya yang dilakukan secara langsung (offline). Sedangkan yang dilakukan secara *daring* seperti tahun 2022 tidak dilaksanakan lagi;
- Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P.21 (berkas perkara dinyatakan lengkap). Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 0,92 atau < 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022, hal ini disebabkan target kasus dinyatakan lengkap (P.21) pada tahun 2023 sebanyak 32 Kasus, lebih banyak dibanding tahun 2022 sebanyak 24 kasus. Demikian pula realisasi kasus P.21 tahun 2023 sebanyak 33 kasus, lebih banyak dari tahun 2022 sebanyak 27 kasus.
- Peningkatan Kapasitas PPNS. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 1,12 atau > 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023 lebih bagus dari tahun 2022, hal ini dikarenakan pelaksanaan peningkatan kapasitas PPNS banyak diselenggarakan oleh Direktorat Penegakan Hukum Pidana (PHP) untuk meningkatkan kualitas PPNS dalam menangani kejahatan LHK yang makin kompleks;
- Layanan Perkantoran. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 1,00 atau $= 1$; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023

tetap/sama dengan tahun 2022, hal ini dikarenakan layanan dukungan Layanan Perkantoran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai secara keseluruhan.

- Layanan Umum. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 1; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023 sama dengan capaian efektivitas kinerja tahun sebelumnya, juga dikarenakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai secara keseluruhan.
- Sedangkan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Layanan Sarana Internal belum dapat dinilai efektifitasnya, karena pada tahun sebelumnya belum ada.

Sedangkan nilai untuk capaian efisiensi penggunaan anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara tahun 2023, untuk masing-masing IKK sebagai berikut :

- Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran 2023 sebesar 1,33 atau > 1 ; yang berarti penggunaan anggaran tahun 2023 efisien dalam mencapai sasaran kegiatan;
- Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran tahun 2023 sebesar 2,17 atau > 1 , berarti penggunaan anggaran berjalan secara efisien dalam mencapai sasaran kegiatan;
- Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran tahun 2023 sebesar 1,47 atau > 1 , berarti penggunaan anggaran berjalan secara efisien dalam mencapai sasaran kegiatan;
- Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran 2023 sebesar 1,33 atau > 1 , yang berarti penggunaan anggaran tahun 2023 berjalan secara efisien dalam mencapai sasaran kegiatan. Hal ini ditambah lagi adanya anggaran

yang digunakan untuk kegiatan penanganan pengaduan non perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan. Pada tahun 2023 terdapat penanganan pengaduan non perusahaan sebanyak 36 sasaran dari rencana sebanyak 28 sasaran (128,57%), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 417.341.673,-;

- Peningkatan Kapasitas PPLH. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran 2023 sebesar 2,50; yang berarti penggunaan anggaran tahun 2023 efisien dalam mencapai sasaran kegiatan;
- Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran 2023 sebesar 1 atau = 1; yang berarti penggunaan anggaran tahun 2023 efisien dalam mencapai sasaran kegiatan;
- Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran tahun 2023 sebesar 1,03 atau >1, berarti penggunaan anggaran efisien dalam mencapai sasaran kegiatan
- PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran 2023 sebesar 2,80 ; atau >1, berarti penggunaan anggaran efisien dalam mencapai sasaran kegiatan;
- Layanan Perkantoran. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran 2023 sebesar 1.00 atau = 1, yang berarti penggunaan anggaran tahun 2023 efisien dalam mencapai sasaran kegiatan;
- Layanan Umum. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran 2023 sebesar 1,00 atau = 1 ; yang berarti capaian efisiensi penggunaan anggaran 2023 efisien dalam mencapai sasaran kegiatan;
- Layanan Sarana Internal. Nilai capaian efisiensi penggunaan anggaran 2023 sebesar 1,00 atau = 1 ; yang berarti capaian efisiensi penggunaan anggaran 2023 efisien dalam mencapai sasaran kegiatan;

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Salah satu kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pelaksanaan kinerja yaitu dengan adanya Sumber Daya Manusia yang mencukupi untuk Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

Adapun kendala pencapaian pelaksanaan kinerja yaitu adanya pemahaman yang belum komprehensif oleh personel terhadap tugas pokok dan fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

3.2 Realisasi Anggaran

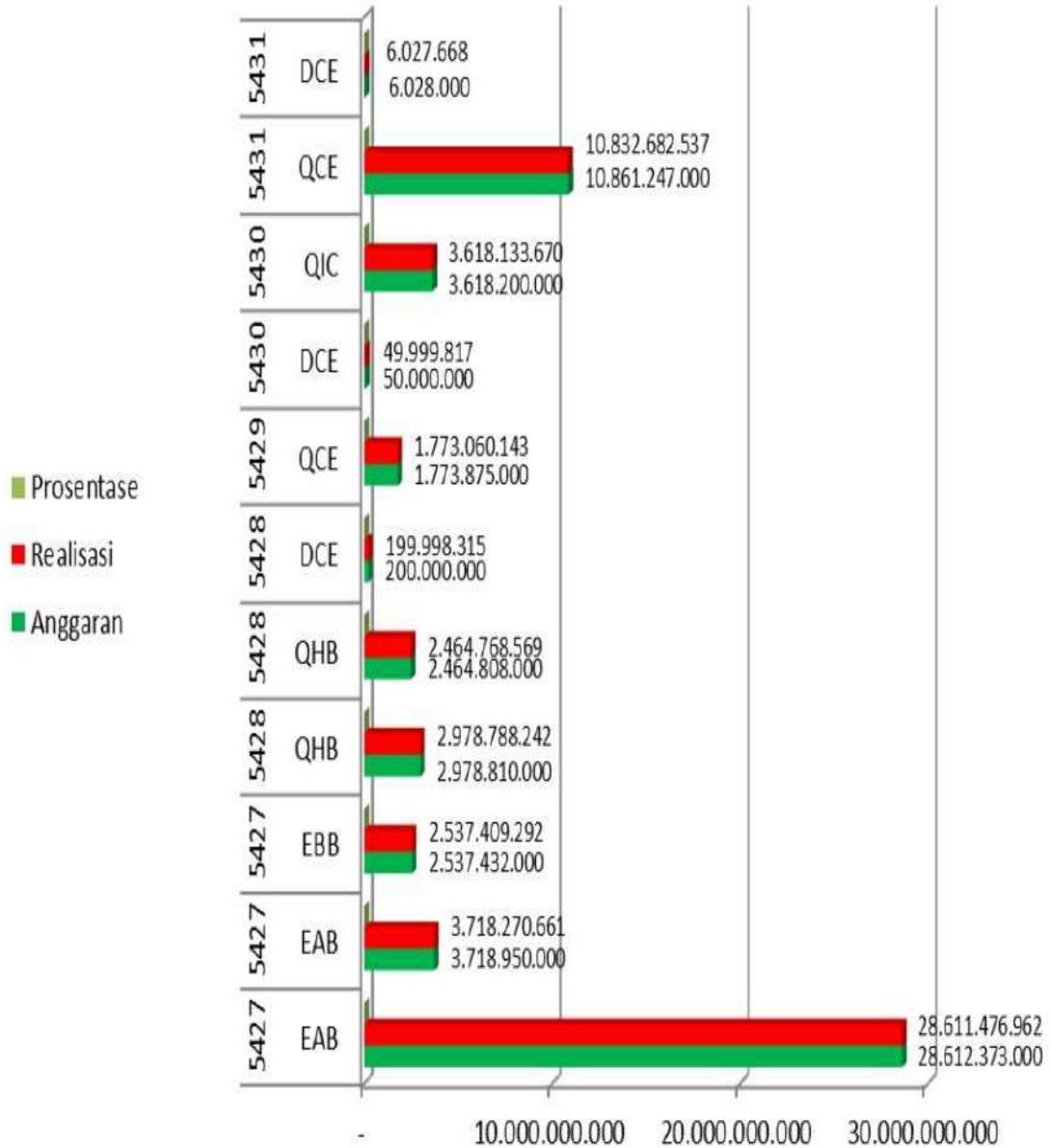
Tahun 2023, anggaran awal BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara adalah sebesar Rp. 45.876.723.000,-, namun setelah mengalami beberapa kali penyesuaian, akhirnya anggaran Balai sebesar Rp. 56.821.723.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 tercapai sebesar Rp. 56.790.615.876,- dengan prosentase sebesar 99,95 % dari pagu anggaran.

Secara rinci pagu anggaran dan realisasi anggaran DIPA Satker BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2023 sebagaimana tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14. Anggaran dan Realisasi DIPA BPPHLHK Wilayah Jabalnusra Tahun 2023

MAK		IKK	TAHUN 2023		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5427	EBA	Layanan Perkantoran	28.612.373.000	28.611.476.962	100,00
5427	EBA	Layanan Umum	3.718.950.000	3.718.270.661	99,98
5427	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.537.432.000	2.537.409.292	100,00
5428	QHB	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	2.978.810.000	2.978.788.242	100,00
5428	QHB	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	2.464.808.000	2.464.768.569	100,00
5428	DCE	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	200.000.000	199.998.315	100,00
5429	QCE	Penyelesaian Sengketa LH	1.773.875.000	1.773.060.143	99,95
5430	DCE	Peningkatan Kapasitas PPLH	50.000.000	49.999.817	100,00
5430	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga/Badan Usaha	3.618.200.000	3.618.133.670	100,00
5431	DCE	Peningkatan Kapasitas PPNS	6.028.000	6.027.668	99,99
5431	QCE	Kasus Tindak Pidana P.21	10.861.247.000	10.832.682.537	99,74
JUMLAH			56.821.723.000	56.790.615.876	99,95

Grafik 3. Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2023



Adapun realisasi anggaran sejak tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15. Anggaran dan Realisasi DIPA BPPHLHK Wilayah Jabalnusra Tahun 2020-2023

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2020	2020	44.426.970.000	44.306.178.080	99,73
2020	2021	35.617.670.000	35.541.538.685	99,79
2020	2022	41.185.745.000	41.157.228.892	99,93
2020	2023	56.821.723.000	56.790.615.876	99,95

Grafik 3. Anggaran dan Realisasi DIPA BPPHLHK Wilayah Jabalnusra Tahun 2020-2023



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 2023, adalah :
 - a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan Perkantoran)
 - b. Layanan Dukungan Manajemen Satker UPT (Layanan Umum)
 - c. Layanan Sarana Internal
 - d. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan;
 - e. Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal;
 - f. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan;
 - g. Peningkatan Kapasitas PPLH;
 - h. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi;
 - i. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
 - j. Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21;
 - k. PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya;
- 2) Capaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 1,43 atau > 1; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023 lebih bagus dari tahun 2022, hal ini disebabkan anggaran untuk kegiatan Operasi Pengamanan Kawasan Hutan pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.978.810.000,- lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 1.841.212.000,-.
 - b. Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 1,44 atau > 1; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023 lebih bagus dari tahun 2022, hal ini disebabkan anggaran untuk kegiatan Peredaran Hasil Hutan pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.464.808.000,- lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 1.336.610.000,-. Kegiatan operasi peredaran hasil hutan, khususnya operasi peredaran TSL memang cukup dominan di wilayah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum

LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, karena menjadi lokasi tujuan perdagangan dari berbagai daerah di Indonesia.

- c. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 0,49 atau < 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022, hal ini disebabkan kegiatan latihan menembak, yang pada tahun 2022 anggarannya dimasukkan dalam komponen peningkatan kapasitas, pada tahun 2023, anggarannya dimasukkan dalam komponen operasi, sehingga tidak direncanakan dan dicatat dalam komponen peningkatan kapasitas polisi kehutanan;
- d. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 1,29 atau > 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022, hal ini disebabkan anggaran untuk Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.618.200.000,- lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 1.867.255.000,-. Demikian pula target yang diberikan Direktorat PPSA kepada BPPHLHK Jablnusra tahun 2023 sebanyak 159 lembaga/perusahaan, lebih besar dari target tahun 2022 sebanyak 98 perusahaan. Sehingga dengan besarnya output yang diberikan memacu untuk lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan verifikasi lapangan;
- e. Peningkatan Kapasitas PPLH. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 0,46 atau < 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022, hal ini dikarenakan pelaksanaan peningkatan kapasitas PPLH yang dicatat hanya yang dilakukan secara langsung (offline). Sedangkan yang dilakukan secara *daring* seperti tahun 2022 tidak dilaksanakan lagi;
- f. Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P.21 (berkas perkara dinyatakan lengkap). Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 0,92 atau < 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023 lebih rendah dari tahun

2022, hal ini disebabkan target kasus dinyatakan lengkap (P.21) pada tahun 2023 sebanyak 32 Kasus, lebih banyak dibanding tahun 2022 sebanyak 24 kasus. Demikian pula realisasi kasus P.21 tahun 2023 sebanyak 33 kasus, lebih banyak dari tahun 2022 sebanyak 27 kasus.

- g. Peningkatan Kapasitas PPNS. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 1,12 atau > 1 ; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023 lebih bagus dari tahun 2022, hal ini dikarenakan pelaksanaan peningkatan kapasitas PPNS banyak diselenggarakan oleh Direktorat Penegakan Hukum Pidana (PHP) untuk meningkatkan kualitas PPNS dalam menangani kejahatan LHK yang makin kompleks;
 - h. Layanan Perkantoran. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 1,00 atau $= 1$; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023 tetap/sama dengan tahun 2022, hal ini dikarenakan layanan dukungan Layanan Perkantoran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai secara keseluruhan.
 - i. Layanan Umum. Nilai efektivitas capaian Penggunaan Sumber Daya sebesar 1; yang berarti capaian efektivitas kinerja tahun 2023 sama dengan capaian efektivitas kinerja tahun sebelumnya, juga dikarenakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai secara keseluruhan.
 - j. Sedangkan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Layanan Sarana Internal belum dapat dinilai efektifitasnya, karena pada tahun sebelumnya belum ada.
- 3) Anggaran DIPA Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tahun 2023 sebesar Rp. 56.821.723.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 tercapai sebesar Rp. 56.790.615.876,- dengan prosentase sebesar 99,95 % dari pagu anggaran.

4.2. Saran

- 1) Kegiatan yang telah mencapai target, agar dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
- 2) Meningkatkan capaian kinerja dengan lebih mengedepankan lagi efisiensi dan efektivitas.
- 3) Kegiatan PPH (Puldasi dan Operasi) dan PHP (Puldasi dan Penyidikan), lebih efektif apabila didasarkan pada pengaduan yang masuk ke BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, sehingga penanganan penegakan hukum lebih bermanfaat untuk masyarakat.
- 4) Pelaksanaan operasi hendaknya dipersiapkan dengan matang, sehingga menghasilkan output yang maksimal dan dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan penegakan hukum pidana (PHP)

**DOKUMENTASI KEGIATAN
BALAI PENGAMANAN DAN
PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH JAWA
BALI NUSA TENGGARA
TAHUN 2023**

Foto. 1. Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Tahun 2023





Foto. 2. Operasi Peredaran Hasil Hutan



Foto. 3. Puldasi Pengamanan Kawasan Hutan



Foto. 4. Puldasi Peredaran Hasil Hutan

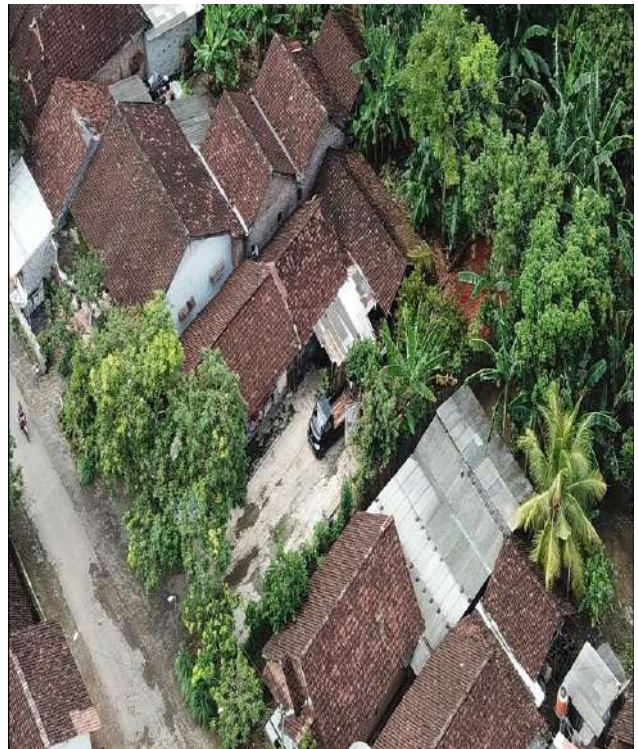


Foto 6. Kegiatan Pengay



Foto 5. Kegiatan Verifikasi Lapangan Pengaduan



Foto 6. Kegiatan Pengawasan



Foto 7. Kegiatan Penyidikan



**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Tgl Data : 10/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 10/01/24 9:10 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

UAPB : 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UAKPB : 401815 BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023			MUTASI			BERKURANG			SALDO PER 31 DESEMBER 2023				
			KUAN- TITAS	NILAI	4	KUAN- TITAS	NILAI	7	KUAN- TITAS	NILAI	8	KUAN- TITAS	NILAI	9	KUAN- TITAS	NILAI
131111	Tanah	3	325	10,532,438,000	0	0	0	0	0	0	0	0	325	10,532,438,000		
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	325	10,532,438,000	0	0	0	0	0	0	0	0	325	10,532,438,000		
132111	Peralatan dan Mesin		2,030	34,071,781,564	249	2,625,038,092	19	637,370,900	2,260	36,059,448,756						
3010313010	Kompresor Selam	Unit	1	56,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	56,100,000		
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	15	4,729,860,520	1	568,000,000	0	0	16	5,297,860,520			16	5,297,860,520		
3020102999	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	dummy	0	0	1	276,300,000	0	0	1	276,300,000			1	276,300,000		
3020103002	Pick Up	Unit	23	8,840,040,000	0	53,862,192	1	376,500,000	22	8,517,402,192			22	8,517,402,192		
3020104001	Sepeda Motor	Unit	18	408,116,833	2	44,200,000	0	0	21	452,316,833			21	452,316,833		
3020104004	Sepeda Motor Patrol	Unit	16	546,311,800	0	0	0	0	16	546,311,800			16	546,311,800		
3020105020	Mobil Unit Tahanan	Unit	1	700,000,000	0	0	0	0	1	700,000,000			1	700,000,000		
3020105125	Mobil Supervisi Lapangan	unit	1	647,500,000	0	0	0	0	1	647,500,000			1	647,500,000		
3020302001	Speed Boat / Motor Tempel	Unit	1	8,910,957,199	0	0	0	0	1	8,910,957,199			1	8,910,957,199		
3030106011	Gergaji Chain Saw	Buah	1	5,200,000	0	0	0	0	1	5,200,000			1	5,200,000		
3030201003	Perkakas Pengukur	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3030204999	Perkakas Pengangkat Lainnya	dummy	7	2,915,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2,915,000		
3030205001	Tool Kit Set	Buah	0	0	1	49,900	1	49,900	0	0	0	0	1	49,900		
3030205002	Tool Kit Box	Buah	0	0	1	158,000	1	158,000	0	0	0	0	1	158,000		
3030211003	Rol Meter	Buah	88	1,696,000	0	0	0	0	88	1,696,000			88	1,696,000		
3030301029	PH Meter (Alat Ukur Universal)	Buah	0	0	2	3,600,000	0	0	2	3,600,000			2	3,600,000		
3030301130	Water Analysis Kit	Buah	3	106,500,000	0	0	0	0	3	106,500,000			3	106,500,000		
3030307010	Scanner (Universal Tester)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3030308018	Loup	Buah	57	7,685,000	0	0	0	0	57	7,685,000			57	7,685,000		
3030308035	Desicator (Size) 3	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3030309004	Alat Pengukur Garis Tengah	Buah	27	11,600,000	0	0	0	0	27	11,600,000			27	11,600,000		
3030399999	Alat Ukur Lainnya	dummy	1	990,000	0	0	0	0	1	990,000			1	990,000		
3040104003	Rak-Rak Penyimpan	Buah	1	1,999,000	0	0	0	0	1	1,999,000			1	1,999,000		
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	29	134,107,822	7	26,672,000	0	0	36	160,779,822			36	160,779,822		
3050102001	Mesin Hitung Manual	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	11	31,887,350	2	12,249,000	0	0	13	44,136,350			13	44,136,350		
3050104002	Lemari Kayu	Buah	1	3,135,020	0	0	0	0	1	3,135,020			1	3,135,020		
3050104003	Rak Besi	Buah	5	815,000	0	0	0	0	5	815,000			5	815,000		
3050104004	Rak Kayu	Buah	0	0	1	3,450,000	0	0	1	3,450,000			1	3,450,000		
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	8	19,977,000	1	3,000,000	0	0	9	22,977,000			9	22,977,000		
3050104007	Brandkas	Buah	7	43,638,174	0	0	0	0	7	43,638,174			7	43,638,174		
3050104015	Locker	Buah	17	45,378,100	0	0	0	0	17	45,378,100			17	45,378,100		
3050104020	Lemari Display	Buah	12	34,625,000	0	0	0	0	12	34,625,000			12	34,625,000		
3050104024	Laci Box	Buah	0	0	1	799,000	0	0	1	799,000			1	799,000		

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

UAPB : 029
UAKPB : 401815

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

Tgl Data : 10/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 10/01/24 9:10 AM
Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_saitker

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023			MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2023		
			BERTAMBAH			BERKURANG					
			KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3050104028	Lemari Penyimpanan Serjata	unit	7	95,141,928	0	0	0	0	0	95,141,928	
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	6	42,750,000	1	15,750,000	0	0	0	58,500,000	
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	6	207,007,000	0	0	0	0	0	207,007,000	
3050105010	White Board	Buah	5	2,018,500	0	0	0	0	0	2,018,500	
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	1,050,000	4	8,000,000	0	0	0	9,050,000	
3050105017	Mesin Absensi	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3050105037	White Board Electronic	Buah	1	9,647,000	0	0	0	0	0	9,647,000	
3050105044	Mesin Laminating	Buah	1	1,950,000	0	0	0	0	0	1,950,000	
3050105047	Lampu-lampu Kristal	Buah	1	3,520,000	0	0	0	0	0	3,520,000	
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	5	67,581,300	4	40,909,000	0	0	0	108,490,300	
3050105052	Alat Pererekam Suara (Voice Pen)	Buah	3	3,877,500	0	0	0	0	0	3,877,500	
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	3,900,000	3	34,359,000	0	0	0	38,259,000	
3050105072	Compact Hand Projector	Buah	4	20,003,200	0	0	0	0	0	20,003,200	
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	3	11,770,000	0	0	0	0	0	11,770,000	
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	0	0	14	41,986,000	0	0	0	41,986,000	
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	165	271,708,949	2	4,200,000	0	0	0	275,908,949	
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	114	139,209,900	32	16,160,000	0	0	0	155,369,900	
3050201004	Kursi Kayu	Buah	7	23,895,721	0	0	0	0	0	23,895,721	
3050201008	Meja Rapat	Buah	26	84,534,973	1	11,800,000	0	0	0	96,334,973	
3050201013	Meja Telepon	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	17	96,115,240	0	0	0	0	0	96,115,240	
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	42	123,340,250	8	15,800,000	0	0	0	139,140,250	
3050201018	Meja Makan Besi	Buah	4	7,277,200	0	0	0	0	0	7,277,200	
3050201022	Partisi	Buah	4	13,200,000	0	0	0	0	0	13,200,000	
3050201024	Rek Sepatu (Aluminium)	Buah	1	1,650,000	0	0	0	0	0	1,650,000	
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	3	64,741,146	0	0	0	0	0	64,741,146	
3050201033	Sofa	set	4	21,205,000	4	42,780,000	0	0	0	63,985,000	
3050203001	Mesin Penghisap Debur/Vacuum Cleaner	set	4	21,205,000	4	42,780,000	0	0	0	63,985,000	
3050204001	Lemari Es	Buah	2	3,456,000	0	0	0	0	0	3,456,000	
3050204004	A.C. Split	Buah	6	23,212,050	0	0	0	0	0	23,212,050	
3050204006	Kipas Angin	Buah	64	391,476,170	15	95,700,000	0	0	0	487,176,170	
3050204007	Exhaust Fan	Buah	8	4,394,477	0	0	0	0	0	4,394,477	
3050204008	Cold Storage (Alat Pendingin)	Buah	8	4,969,470	0	0	0	0	0	4,969,470	
3050205002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	2	20,979,000	0	0	0	0	0	20,979,000	
3050205008	Kitchen Set	Buah	4	1,879,985	0	0	0	0	0	1,879,985	
3050205011	Treng Air/Tandon Air	Buah	2	15,861,354	0	0	0	0	0	15,861,354	
3050205999	Alat Dapur Lainnya	dummy	2	6,050,000	0	0	0	0	0	6,050,000	
			9	15,960,000	0	0	0	0	0	15,960,000	

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Tgl Data : 10/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 10/01/24 9:10 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

UAPB : 029
UAKPB : 401815
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023			MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2023		
			BERTAMBAH			BERKURANG					
			KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3050206002	Televisi	Buah	12	70,268,002	3	17,883,000	0	0	15	88,151,002	
3050206006	Equalizer	Buah	1	5,170,000	0	0	0	0	1	5,170,000	
3050206007	Loudspeaker	Buah	2	11,800,000	0	0	0	0	2	11,800,000	
3050206008	Sound System	Buah	3	63,230,000	2	6,850,000	0	0	5	70,080,000	
3050206012	Wireless	Buah	1	8,800,000	0	0	0	0	1	8,800,000	
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	2	440,000	0	0	0	0	2	440,000	
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3050206030	Tiang Bendera	Buah	1	2,200,000	0	0	0	0	1	2,200,000	
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	7	15,800,000	0	0	0	0	7	15,800,000	
3050206035	Kaca Hias	Buah	3	375,000	0	0	0	0	3	375,000	
3050206036	Dispenser	Buah	11	18,055,583	1	2,320,000	0	0	12	20,375,583	
3050206046	Handy Cam	Buah	9	78,647,880	0	0	0	0	9	78,647,880	
3050206058	Gordyn/Kray	Buah	38	93,395,212	1	15,000,000	0	0	39	108,395,212	
3050206059	Kabel Roll	Buah	1	1,320,000	0	0	0	0	1	1,320,000	
3050206068	DVD Player	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3050206070	Tangga	Buah	1	440,000	0	0	0	0	1	440,000	
3050206071	Kabel	Buah	1	550,000	0	0	0	0	1	550,000	
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	167,250	0	0	0	0	1	167,250	
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	1	2,798,000	0	0	0	0	1	2,798,000	
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	3	660,000	0	0	0	0	3	660,000	
3060101005	Audio Amplifier	Buah	3	10,958,000	0	0	0	0	3	10,958,000	
3060101031	Intercom Unit	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	2	9,053,000	0	0	0	0	2	9,053,000	
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	1	440,000	0	0	0	0	1	440,000	
3060101079	Microphone Cable	Buah	2	990,000	0	0	0	0	2	990,000	
3060101088	Voice Recorder	Buah	7	13,892,600	1	2,100,000	0	0	8	15,792,600	
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	27	2,037,000	0	0	0	0	27	2,037,000	
3060102003	Camera Electronic	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	
3060102042	Rak Peralatan	Buah	3	4,169,000	0	0	0	0	3	4,169,000	
3060102127	Camera Under Water	Buah	0	0	2	39,000,000	0	0	2	39,000,000	
3060102128	Camera Digital	Buah	31	316,696,288	1	16,199,000	0	0	32	334,895,288	
3060102129	Tas Kamera	Buah	21	2,887,500	0	0	0	0	21	2,887,500	
3060102135	LCD Monitor	Buah	1	1,750,000	0	0	0	0	1	1,750,000	
3060102165	Camera Conference	Buah	0	0	1	28,105,000	0	0	1	28,105,000	
3060105035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	2	5,000,000	0	0	0	0	2	5,000,000	
3060105038	GPS Receiver	Buah	6	29,360,410	0	0	0	0	6	29,360,410	

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPABEL DAN EKSTRAKOMPABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

UAPB : 029
UAKPB : 401815

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

Tgl Data : 10/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 10/01/24 9:10 AM
Halaman : 4

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		BERTAMBAH		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
			4	5	6	7	8	9	10	11		
3060105047	Kamera Udara	Buah	9	277,347,300	2	76,300,000	0	0	0	0	11	353,647,300
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	38	84,775,000	0	0	0	0	0	0	38	84,775,000
3060201010	Facsimile	Buah	1	3,924,075	0	0	0	0	0	0	1	3,924,075
3060201017	Telepon Satelit	Buah	3	44,775,000	0	0	0	0	0	0	3	44,775,000
3060201020	Telepon Digital	Buah	1	1,430,000	0	0	0	0	0	0	1	1,430,000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	2	26,527,000	17	238,114,000	1	13,000,000	0	0	18	251,641,000
3060204999	Alat Komunikasi Radio VHF Lainnya	dummy	1	3,718,000	0	0	0	0	0	0	1	3,718,000
3060207005	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	Buah	12	31,126,350	0	0	0	0	0	0	12	31,126,350
3060299999	Alat Komunikasi Lainnya	dummy	0	0	2	24,600,000	2	24,600,000	0	0	0	0
3060308999	Peralatan Antena VHF/FM Lainnya	dummy	1	1,276,000	0	0	0	0	0	0	1	1,276,000
3060347002	All Band Receiver	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060399999	Genset	Buah	2	6,600,000	1	37,800,000	0	0	0	0	3	44,400,000
3070101090	Peralatan Pemancar Lainnya	dummy	5	8,500,000	0	0	0	0	0	0	5	8,500,000
3070101127	Laser Unit	Buah	2	39,649,500	0	0	0	0	0	0	2	39,649,500
3070101145	Kursi Dorong	Buah	186	158,166,835	52	88,400,000	0	0	0	0	238	246,566,835
3070101162	Temperatur Monitor	Buah	5	139,200,000	0	0	0	0	0	0	5	139,200,000
3070101162	Sentier	Buah	10	2,200,000	0	0	0	0	0	0	10	2,200,000
3070299999	Alat Kesehatan Umum Lainnya	Buah	2	7,400,800	0	0	0	0	0	0	2	7,400,800
3080101014	Alat Pengukur Kadar Air	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3080110111	Vernier Caliper Height Gauge	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3080111023	Timbangan/Neraca	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3080111038	Calliper & Micrometer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3080141093	Freezer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	7	392,000	0	0	0	0	0	0	7	392,000
3080141194	Freezer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	3	13,475,000	0	0	0	0	0	0	3	13,475,000
3080141251	Stabilizer/UPS	Buah	58	737,658,390	2	22,800,000	0	0	0	0	60	760,458,390
3080156079	Head Lamp (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	2	12,033,000	0	0	0	0	0	0	2	12,033,000
3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	21	5,197,500	0	0	0	0	0	0	21	5,197,500
3080203109	Kandang Logam Untuk Penelitian	Buah	6	12,015,000	0	0	0	0	0	0	6	12,015,000
3080205003	Eye Goggles	Buah	3	9,900,000	0	0	0	0	0	0	3	9,900,000
3080306039	Infrared Thermometer	Buah	3	16,335,000	0	0	0	0	0	0	3	16,335,000
3080706999	Peralatan Umum Lainnya	Buah	12	13,860,000	0	0	0	0	0	0	12	13,860,000
3090101999	Senjata Genggam Lainnya	dummy	1	1,100,000	0	0	0	0	0	0	1	1,100,000
3090103999	Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang Lainnya	dummy	1	38,905,500	0	0	0	0	0	0	1	38,905,500
3090201045	Standart Binocular	dummy	30	883,000,000	0	0	0	0	0	0	30	883,000,000
3090201057	Alat Surveillance Telekomunikasi Mobile	Buah	4	50,000,000	0	0	0	0	0	0	4	50,000,000
3090201059	Jammer	Buah	6	24,300,000	0	0	0	0	0	0	6	24,300,000
		Buah	3	4,455,000	0	0	0	0	0	0	3	4,455,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Tgl Data : 10/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 10/01/24 9:10 AM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_gab_salker

UAPB : 029
UAKPB : 401815
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		BERTAMBAH		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3										
3090201107	Tenda Pleton (Alat Keamanan)	unit	1	10,890,000	0	0	0	0	0	0	1	10,890,000
3090402031	Kamera Digital	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3090403004	GPS	Buah	25	121,166,000	1	8,300,000	0	0	0	0	26	129,466,000
3090403011	Helim Tempur	Buah	39	156,000,000	0	0	0	0	0	0	39	156,000,000
3090403012	Rompi Anti Peluru	Buah	39	349,050,000	0	0	0	0	0	0	39	349,050,000
3090403053	Tactical Ballistic Plate Carrier	Buah	22	17,319,300	0	0	0	0	0	0	22	17,319,300
3090404011	Tustel Camera	Buah	0	0	1	18,199,000	0	0	0	0	1	18,199,000
3090404023	Pocket Camera AF-230	Buah	15	13,260,010	0	0	0	0	0	0	15	13,260,010
3090405012	Barcode Reader	unit	10	22,660,000	0	0	0	0	0	0	10	22,660,000
3090407022	Layar Proyektor	Buah	1	852,500	0	0	0	0	0	0	1	852,500
3100102001	P.C Unit	Buah	5	79,526,230	0	0	0	0	0	0	5	79,526,230
3100102002	Lap Top	Buah	129	1,832,897,525	20	363,805,000	0	0	0	0	149	2,196,702,525
3100201012	Hard Disk	Buah	0	0	1	3,300,000	0	0	0	0	1	3,300,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	104	308,599,243	13	55,900,000	0	0	0	0	117	364,499,243
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	40	323,172,250	6	49,200,000	0	0	0	0	46	372,372,250
3100204001	Server	Buah	1	38,250,000	0	0	0	0	0	0	1	38,250,000
3100204005	Network Interface External	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100299001	Laptop Case	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3120202002	Sondir	dummy	0	0	9	170,505,000	0	0	0	0	9	170,505,000
3150301014	Carabiner Kecil	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3150302005	Tenda	Buah	5	3,850,000	0	0	0	0	0	0	5	3,850,000
3150303001	Alat Selam Seet	Buah	33	38,115,000	0	0	0	0	0	0	33	38,115,000
3150303040	Kamera/Video dengan tempatnya U/ Bawah Air (Sea & Sea)	Buah	4	124,520,000	0	0	0	0	0	0	4	124,520,000
3150303059	Senter, Under Water Kinetic	Buah	1	9,900,000	0	0	0	0	0	0	1	9,900,000
3150399999	Alat SAR Lainnya	Buah	1	1,320,000	0	0	0	0	0	0	1	1,320,000
3170120021	Handling Hood	dummy	6	8,892,400	0	0	0	0	0	0	6	8,892,400
3190106003	Sepeda Olah Raga	Buah	12	23,400,000	0	0	0	0	0	0	12	23,400,000
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	Buah	3	61,380,000	0	0	0	0	0	0	3	61,380,000
133111	Gedung dan Bangunan	dummy	0	0	2	18,574,000	0	0	0	0	2	18,574,000
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	3	7,036,773,913	0	0	0	0	0	0	3	7,036,773,913
4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	dummy	2	6,007,218,453	0	0	0	0	0	0	2	6,007,218,453
134112	Irigasi	dummy	1	1,029,555,460	0	0	0	0	0	0	1	1,029,555,460
5020601003	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	Unit	1	110,102,000	0	0	0	0	0	0	1	110,102,000
134113	Jaringan	Unit	1	110,102,000	0	0	0	0	0	0	1	110,102,000
5030101001	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Kecil	Unit	5	44,848,000	0	0	0	0	0	0	5	44,848,000
5030901001	Instalasi Penangkal Petir Manual	Unit	1	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1	1,800,000
		Unit	2	300,000	0	0	0	0	0	0	2	300,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPABEL DAN EKSTRAKOMPABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

UAPB : 029 **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
UAKPB : 401815 **BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

Tgl Data : 10/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 10/01/24 9:10 AM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		BERTAMBAH		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2023
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
			3	5	6	7	8	9	10	11	
1	2		4								
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206056	Karpet	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206068	DVD Player	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101031	Intercom Unit	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101074	Compact Disc Recorder	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102003	Camera Electronic	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102042	Rak Peralatan	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102057	Slide Projector	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060104045	Mesin Barcode	Buah	4	113.405.050	0	0	0	0	0	0	113.405.050
3060105038	GPS Receiver	Buah	1	7.408.500	0	0	0	0	0	0	7.408.500
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060323021	All Band Receiver	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101127	Kursi Dorong	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3070111205	Infra Red & Ultraviolet	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3080101014	Alat Pengukur Kadar Air	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3080110111	Vernier Caliper Height Gauge	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3080111023	Timbangan/Neraca	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3080111038	Caliper & Micrometer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3080111100	Dry Oven	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3080141116	Hand Counter	Buah	11	412.500	0	0	0	0	0	0	412.500
3080141194	Personal Computer	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3090402031	Kamera Digital	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100101999	Computer Jaringan Lainnya	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102002	Lap Top	Buah	3	43.731.280	0	0	0	0	0	0	43.731.280
3100102003	Note Book	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204005	Netware Interface External	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5030901001	Instalasi Penangkal Petir Manual	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				52.006.584,907		2.653.143,092		685.475,900		53.994.251,999	



PERJANJIAN KINERJA TOP UP PNBP TA. 2023

**BALAI PENGAMANAN DAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH
JAWA, BALI, NUSA TENGGARA**

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LHK

KATA PENGANTAR

Pada pertengahan Tahun 2023, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara mendapatkan tambahan pagu anggaran PNBP. Penambahan PNBP/ *Top-Up* PNBP ini berimplikasi pada penambahan target pada beberapa IKK dan juga penambahan IKK baru. IKK baru ditambahkan karena adanya kewenangan baru yang didelegasikan kepada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara.

Berkaitan dengan penambahan anggaran tersebut, maka perlu disusun kembali dokumen perjanjian kinerja top-up PNBP yang memuat perubahan anggaran maupun target kinerja di setiap unit kinerja lingkup BPPHLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara.

Dengan adanya penambahan anggaran pada DIPA BPPHLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2023, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab seluruh jajaran di lingkungan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini memuat seluruh informasi BPPHLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, yang diharapkan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kepala Balai,



Taqiuddin, S.Hut., M.P
NIP.19740628 199903 1 002

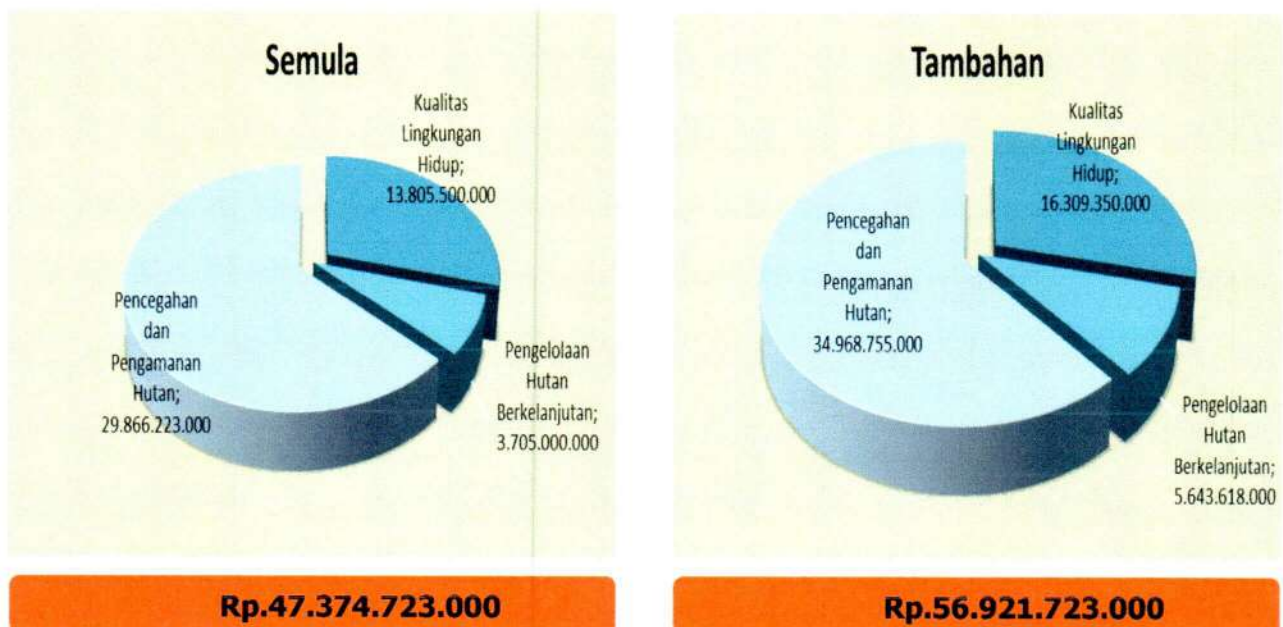
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2023	1
B. PERUBAHAN TARGET KINERJA TAHUN 2023 PER UNIT KERJA	2
C. PERUBAHAN ANGGARAN PER-RO TAHUN 2023	3
LAMPIRAN – LAMPIRAN	6

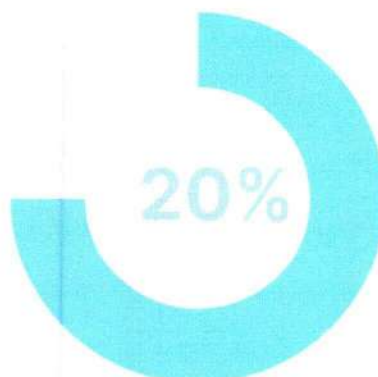
A. PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2023

Pada awal tahun 2023, Alokasi anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara sebagaimana yang telah tertuang dalam DIPA adalah sebesar **Rp.47.374.723.000,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).**

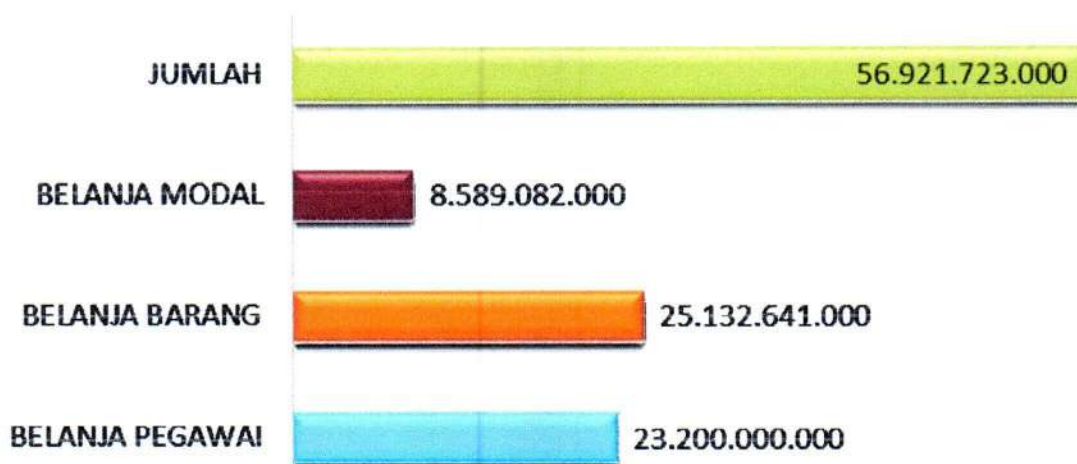
Namun setelah melalui beberapa kali perubahan/penghematan/penyesuaian, alokasi anggaran BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara adalah sebesar **Rp. 56.921.723.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).** Alokasi anggaran per-program adalah sebagai berikut :



Kenaikan Anggaran



Untuk alokasi anggaran per-jenis belanja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara setelah ada penambahan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH
■ Pagu	23.200.000.000	25.132.641.000	8.589.082.000	56.921.723.000

B. PERUBAHAN TARGET KINERJA TAHUN 2023

Perubahan IKK dan Target IKK sampai dengan Akhir Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	IKK TAHUN 2023	
			SEMULA	MENJADI
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pene-gakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
	Terlaksananya Pencegahan dan Pengaman Hutan terhadap gang-guan dan anc-	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	3 Operasi	6 Operasi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	IKK TAHUN 2023	
			SEMULA	MENJADI
2	aman hutan di 34 Provinsi	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	4 Operasi	5 Operasi
		Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	15 Orang	15 Orang
3	Meningkatnya efektivitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	124 Perusahaan	159 Perusahaan
		PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	10 Orang
4	Meningkatnya efektivitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21	31 Kasus	32 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan	4 Orang	5 Orang
		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani	-	2 perkara

C. PERUBAHAN ANGGARAN PER-RINCIAN OUPUT TAHUN 2023

Perubahan anggaran per-rincian ouput Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara setelah adanya *Top-Up* PNPB adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	ANGGARAN (Rp)	
				SEMULA	MENJADI
Kualitas Lingkungan Hidup	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Penanganan Perkara	Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	0	1.773.875.000

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	ANGGARAN (Rp)	
				SEMULA	MENJADI
	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi (5430)	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas PPLH	100.000.000	50.000.000
		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	3.245.500.000	3.618.200.000
	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (5431)	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas PPNS	20.000.000	6.028.000
		Penanganan Perkara	Kasus Tindak Pidana LHK P21	10.440.000.000	10.861.247.000
Total				13.805.500.000	16.309.350.000

2. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	ANGGARAN (Rp)	
				SEMULA	MENJADI
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pencegahan dan Pengamanan Hutan (5428)	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	200.000.000	200.000.000
		Operasi Bidang Keamanan	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	1.655.000.000	2.959.810.000
			Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	1.850.000.000	2.483.808.000
Total				3.705.000.000	5.643.618.000

3. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	ANGGARAN (Rp)	
				SEMULA	MENJADI
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan	Layanan Dukungan Manajemen	Layanan Umum	950.000.000	3.718.950.000

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	ANGGARAN (Rp)	
				SEMULA	MENJADI
	Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK (5427)	Internal	Layanan Perkantoran	28.916.223.000	28.712.373.000
			Layanan Sarana Internal	0	2.537.432.000
Total				29.866.223.000	34.968.755.000

LAMPIRAN



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taquiuddin, S.Hut., M.P
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah
Jawa, Bali, Nusa Tenggara

Taquiuddin, S.Hut., M.P
NIP. 19740628 199903 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA, BALI, NUSA TENGGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Revisi Target 2023
1	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	6 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	5 Operasi
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang
2	Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	2 Perkara
3	Meningkatnya pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	159 Badan Usaha
		Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang
4	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	32 Perkara
		Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang
5	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah Layanan Umum	1 Layanan
		Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Unit

Kegiatan :

1. Pencegahan dan Pengamanan LHK
2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi LHK
4. Penegakan Hukum Pidana LHK
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK

Total Anggaran

Anggaran :

- Rp5.643.618.000,00
 Rp1.773.875.000,00
 Rp3.668.200.000,00
 Rp10.867.275.000,00
 Rp34.868.755.000,00
Rp56.821.723.000,00

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pihak Pertama,

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara


 Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
 NIP 19660711 199203 1 018


 Taquiuddin, S.Hut., M.P
 NIP. 19740628 199903 1 002



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Mardiyanto, S.H., M.Sc.
Jabatan : Kepala Seksi Wilayah II
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Taquiuddin, S.Hut., M.P
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2023

Pihak Kedua,

Kepala Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali, Nusa Tenggara



Taquiuddin, S.Hut., M.P
NIP 19740628 199903 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Wilayah II
Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali, Nusa Tenggara

Agus Mardiyanto, S.Hut., M.Sc.
NIP 19721129 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SEKSI WILAYAH II

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA, BALI, NUSA TENGGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023
1.	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	3 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	2 Operasi
2.	Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	2 Perkara
3.	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	70 Badan Usaha
4.	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	14 Perkara

Pihak Kedua,

Kepala Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali, Nusa Tenggara



Taqiuddin S.Hut., M.P
NIP 19740628 199903 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Wilayah II
Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali, Nusa Tenggara

Agus Mardiyanto, S.Hut., M.Sc.
NIP 19721129 199903 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suparman S.P
Jabatan : Kepala Seksi Wilayah III
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Taqiuddin, S.Hut., M.P
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2023

Pihak Kedua,

Kepala Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali, Nusa Tenggara



Taqiuddin, S.Hut., M.P
NIP. 19740628 199903 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Wilayah III
Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali, Nusa Tenggara

Suparman, S.P.
NIP. 19731205 199903 1 001

SEKSI WILAYAH III

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA, BALI, NUSA TENGGARA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023
1.	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	1 Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	1 Operasi
2.	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	14 Badan Usaha
3.	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	7 Perkara

Pihak Kedua,

Kepala Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali, Nusa Tenggara



Faqihuddin, S.Hut., M.P
NIP. 19740626 199903 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Wilayah III
Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali, Nusa Tenggara

Suparman, S.P.
NIP. 19731205 199903 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fachruddin Desi, SH., MH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Taqiuddin, S.Hut., M.P
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2023

Pihak Kedua,

Kepala Balai PPHLHK Wilayah
Jawa Bali, Nusa Tenggara



Taqiuddin, S.Hut., M.P
NIP. 19740628 199903 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali, Nusa Tenggara

Fachruddin Desi, SH., MH
NIP 19751217 200003 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SUB BAGIAN TATA USAHA

**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH JAWA, BALI, NUSA TENGGARA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah Layanan Umum	1 Layanan
		Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Unit
2.	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah Polhut yang akan ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang
3.	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang
4.	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang

Pihak Kedua,

Kepala Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali, Nusa Tenggara



Fachrudin, S.Hut., M.P
NIP 19740628 199903 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Balai PPHLHK Wilayah
Jawa, Bali, Nusa Tenggara

Fachrudin Desi, S.H., M.H.
NIP 19751217 200003 1 004